

**SALAFISME, ULAMA DAYAH DAN KONTESTASI  
OTORITAS KEAGAMAAN DI ACEH**



Oleh:  
**Noviandy**  
Nim. 18300016043

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA  
2021**



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Noviandy  
Nim : 18300016043  
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam  
Kosentrasi : Studi Islam

Menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2021



ang menyatakan,

**Noviandy, S. Fil.I, M. Hum**  
Nim. 18300016043



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: <http://pps.uin-suka.ac.id>

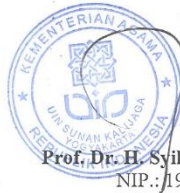
## PENGESAHAN

Judul Disertasi : SALAFISME, ULAMA DAYAH DAN KONTESTASI  
OTORITAS KEAGAMAAN DI ACEH  
Ditulis oleh : Noviandy  
NIM : 1830016043  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Studi Islam

**Telah dapat diterima  
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)  
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 17 Januari 2022

An. Rektor/  
Ketua Sidang.











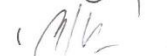
**Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, LC., M.Ag**  
NIP.: 19520921 198403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id


**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus	:	Noviandy	(  )
NIM	:	1830016043	
Judul Disertasi	:	SALAFISME, ULAMA DAYAH DAN KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DI ACEH	
Ketua Sidang	:	Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag.	(  )
Sekretaris Sidang	:	H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.	(  )
Anggota	:	1. Prof. Dr. H. Irwan Abdullah (Promotor/Penguji)	(  )
		2. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. (Promotor/Penguji)	(  )
		3. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. (Penguji)	(  )
		4. Reza Idria, S.HI., M.A, PhD. (Penguji)	(  )
		5. Najib Kaliani, S.Th.I., M.Phil., Ph.D. (Penguji)	(  )
		6. Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D. (Penguji)	(  )

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022

Tempat	:	Aula Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK)	:	3,83
Predikat Kelulusan	:	Pujian ( <i>Cumlaude</i> ) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,

  
H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.  
NIP. 19720414 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA**

**PENGESAHAN PROMOTOR**

**Promotor : Prof. Dr. Irwan Abdullah** ()

**Promotor : Dr. Moch. Nur Ichwan, MA** ()



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**YUDISIUM**

**BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **NOVIANDY** NOMOR INDUK: **1830016043** LAHIR DI **PALOH PUNTI**, TANGGAL **30 NOVEMBER 1982**,

**LULUS DENGAN PREDIKAT :**

**PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~\*\***

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

**\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-807.**

YOGYAKARTA, 17 JANUARI 2022

**AN REKTOR /  
KETUA SIDANG,**



**Prof. Dr. H. Syihabuddin Qalyubi, Lc., M.Ag.**  
NIP.: 19520921 198403 1 00

**\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, wr, wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

### **SALAFISME, ULAMA DAYAH DAN KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DI ACEH**

yang ditulis oleh:

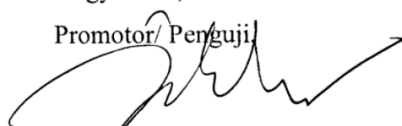
Nama : Noviandy  
Nim : 18300016043  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 september 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr, wb.*

Yogyakarta, 6 Desember 2021

Promotor/ Penguji



**Prof. Dr. Irwan Abdullah**



## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, wr, wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**SALAFISME, ULAMA DAYAH DAN  
KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DI ACEH**

yang ditulis oleh:

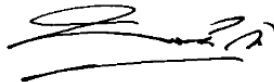
Nama : Noviandy  
Nim : 18300016043  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 september 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr, wb.*

Yogyakarta, 6 Desember 2021

Promotor/ Penguji,



**Dr. Moch Nur Ichwan, S.Ag., MA**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum, wr, wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

### **SALAFISME, ULAMA DAYAH DAN KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DI ACEH**

yang ditulis oleh:

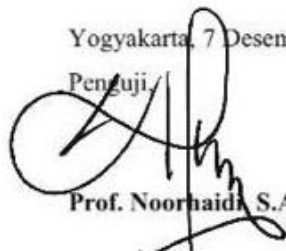
Nama : Noviandy  
Nim : 18300016043  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 september 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr, wb.*

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Penguji/



**Prof. Noorhaidi S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, wr, wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

### **SALAFISME, ULAMA DAYAH DAN KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DI ACEH**

yang ditulis oleh:


Nama : Noviandy  
Nim : 18300016043  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 september 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr, wb.*

Yogyakarta, 6 Desember 2021

Promotor/ Penguji,



**Dr. Reza Idria**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, wr, wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

### **SALAFISME, ULAMA DAYAH DAN KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DI ACEH**

yang ditulis oleh:

Nama : Noviandy  
Nim : 18300016043  
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 14 september 2021, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr, wb.*

Yogyakarta, 6 Desember 2021

Promotor/ Penguji,



**Dr. Najib Kailani**

## ABSTRAK

Disertasi ini bertujuan untuk menelaah kontestasi otoritas keagamaan yang terjadi antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologis untuk mengkaji secara mendalam fenomena-fenomena yang terjadi di balik kontestasi otoritas keagamaan yang terlihat di permukaan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori-teori sosial dalam menganalisa data-data lapangan, baik data wawancara, dokumentasi, observasi, maupun referensi kepustakaan lainnya. Secara spesifik disertasi ini lebih jauh meneliti tentang keberadaan dua kelompok otoritas keagamaan, yaitu kelompok Salafi-Wahabi dan kelompok Ulama Dayah yang saling berkontestasi di Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh.

Penelitian ini membuktikan bahwa kontestasi otoritas keagamaan antara Ulama Dayah dan kelompok Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh tidak murni tentang perdebatan ide atau gagasan keagamaan, khususnya *'Aqidah Islamiyah* dan *fiqhiyah-mazhabiyah*. Melainkan terdapat hal yang lebih urgen, yaitu perebutan ruang publik agama yang merupakan celah kuasa kedua pemilik otoritas dalam mengembangkan sayap otoritas keagamaan. Penelitian ini menemukan 3 (tiga) ruang agama yang diperebutkan dalam kontestasi otoritas keagamaan oleh kedua pemilik otoritas tersebut. *Pertama*: Perebutan ruang ibadah. Ruang atau fasilitas ibadah seperti Masjid dan Mushalla menjadi sangat sentral dalam melanggengkan sebuah otoritas keagamaan. Kedua otoritas keagamaan tersebut melakukan berbagai konstruksi keagamaan; kosmologi doktrin keagamaan, standardisasi ritual keagamaan, hingga peneguhan eksistensi keagamaan dengan menguasai fasilitas ibadah. *Kedua*, Kontestasi dalam mempengaruhi kebijakan keagamaan. Syariat Islam yang telah dideklarasikan di Aceh sejak tahun 2000, tidaklah bertendensi pada salah satu mazhab dan i'tiqad otoritas keagamaan tertentu. Namun dalam pengambilan kebijakan, kedua kelompok yang berkontestasi ini mencoba memengaruhi dan mengontrol setiap kebijakan dan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. *Ketiga*, Perebutan Pengaruh Massa. Pengaruh massa merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh dalam sebuah gerakan otoritas keagamaan. Keberadaan dan peran agensi tidak signifikan dapat didukung dengan keberadaan massa yang solid.

Begitu juga sebaliknya, keberadaan massa tidak bisa dilepaskan dari keberadaan agensi sebagai pemilik otoritas dalam menggerakkan massa. Kedua kelompok yang saling berkontestasi tidak dapat berada di permukaan jika tidak memiliki kekuatan massa yang cukup dalam setiap pergerakan. Fenomena inilah yang menyebabkan perebutan pengaruh massa menjadi hal yang sangat penting dalam merebut ruang keagamaan di Aceh.

Disertasi ini memberikan beberapa kontribusi teoritik dalam pengembangan teori kontestasi otoritas keagamaan. Jika Habermas memandang bahwa ruang publik sangat dipengaruhi oleh agama, hingga ia menggagas teori ruang publik dengan istilah *postsekular*, nilai-nilai agama tetap ada dalam ruang publik di Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, Eickelman dan Salvatore menggagas konsep *public Islam* yang berorientasi pada kebutuhan bersama dalam masyarakat muslim, setiap otoritas yang berkembang berusaha mewujudkan tujuan yang sama. Berbeda dengan kontestasi otoritas keagamaan yang terjadi di Aceh, pemahaman kontestasi otoritas keagamaan menjadi mengembang dan lebih luas, baik dalam menguasai ruang publik agama (fasilitas ibadah), memengaruhi kebijakan keagamaan, maupun memperebutkan pengaruh massa.

Kata Kunci: Ulama Dayah, Salafi-Wahabi, Kontestasi Otoritas, dan Ruang Publik Agama.

## ABSTRACT

This dissertation aims at studying the religious authority contests between Dayah Ulama and Salafi-Wahabi in Banda Aceh city. Beside socio-anthropological approach to thoroughly examine the occurring phenomena behind it, the study also takes social theories to analyze data obtained from interview, documentation, observation and other references. Specifically, the dissertation studies further the presence of the two religious authorities – the Salafi-Wahabi and the Dayah Ulama – in Banda Aceh, the capital of Aceh province.

The results prove that the religious authority contest in Banda Aceh is not merely about religious discrepancies, in particular on '*Aqidah Islamiyah* and *fiqhiyah-mazhabiyah*, but there is also urgent issue like struggling for a religious public space which means power to both parties and opportunities to expand their authority. The study reveals 3 (three) religious spaces they compete for. *First*, the fight for worship space. Worship facilities like mosques and *mushalas* are quite essential for a long-lasting religious authority. And both religious authorities have done many religious constructions from cosmology of religious doctrine, standardized religious rituals to a confirmation of religious existence by taking control worship facilities. *Second*, the competition for religious policy control. The Islamic law declaration in 2000 did not mean to be in favor of certain *mahzab* (sect) nor of certain religious authority's *i'tiqad* (way). In making policy, however, both competing groups try to control and influence the policy and the implementation of Islamic laws in Banda Aceh. *Third*, the struggle for the mass. Mass influence is definitely not negligible with regard to religious movements. The role of insignificant agents can be supported by the existence of solid mass. And the existence of mass is strongly related to the agents as the owner of the authority to make the mass move. Both contesting groups will probably remain unknown without enough power of mass in every action. It is *this* phenomenon that makes mass-influence competition important.

This dissertation gives several theoretic contributions in connection with the development of theory of religious authority contest. If Habermas argued that public space is influenced by religion, then proposed a post-secular theory, religious values

remain in western public space. Eickelman and Savatore later came up with public Islam, a shared need-oriented concept within Muslim community where every authority in the community works on the same shared goals. This is quite different from the authority contest occurrence in Aceh which grows further and controls religious public space (worship facilities), religious policy, and mass.

Key words: Dayah Ulama, Salafi-Wahabi, Authority contest, and Religious Public Space.



## مستخلص البحث

هذه الأطروحة تهدف إلى دراسة المنافسة في السلطة الدينية التي حدثت بين علماء الداية (Dayah) وجماعة "السلفي-الوهابي" في منطقة باندا آتشييه. يستخدم هذا البحث المقاربة السوسيو-الأنثروبولوجية للدراسة عن الظواهر التي تحدث عميقا وراء المنافسة في السلطة الدينية الظاهرة على السطح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البحث يستخدم النظرية الاجتماعية في تحليل المعطيات الميدانية من معطيات المقابلة والتوثيق والملاحظات والمراجع المكتبية الأخرى. وعلى وجه خاص، تبحث هذه الأطروحة بشكل أكبر في وجود المجموعتين للسلطة الدينية، وهما جماعة السلفية-الوهابية ومجموعة علماء الداية (Dayah) التي تنافست بعضهما بعضا في منطقة باندا آتشييه كعاصمة مقاطعة آتشييه.

أثبت هذا البحث أن المنافسة في السلطة الدينية بين علماء الداية (Dayah) وجماعة السلفية-الوهابية في منطقة باندا آتشييه لا تتعلق بالنقاش حول الآراء أو الأفكار الدينية فقط، وخاصة حول العقيدة الإسلامية والفقهية - المذهبية، وإنما توجد هناك أشياء أكثر إلحاحًا، وهي التزاحم في الفضاء العام الديني الذي يعتبر عن الفجوة السلطوية بين السلطتين في تطوير أجنحة السلطة الدينية. واكتشف هذا البحث ثلاثة أفضية دينية تم التزاحم فيها في المنافسة في السلطة الدينية من قبل مالكي هذه السلطة. أولاً، التزاحم في أمكنة العبادة أو المصلبات. أصبحت الأماكن أو التسهيلات في العبادة كالمساجد والمصلبات مركزية للغاية في تخليد سلطة دينية. وقامت السلطان الدينيتان بالانشاءات الدينية، وكونيات العقيدة الدينية، ومعايرة الطقوس الدينية، وتأكيد الوجود الديني عن طريقة الاستيلاء على تسهيلات العبادة. ثانيًا، المنافسة في التأثير على السياسة الدينية. إن الشريعة الإسلامية التي تم إعلانها في آتشييه منذ عام

2000 لا تميل إلى أحد المذاهب والاعتقادات المعينة للسلطات الدينية. ولكن الجماعتين المتنافستين في إثبات السياسة تحاولان على التأثير والسيطرة على كل سياسة وتنفيذ للشريعة الإسلامية في منطقة باندا آتشيه. ثالثاً ، التزاحم في التأثير الجماهيري. إن التأثير الجماهيري أمر لا يمكن الاستهانة به في حركة سلطة دينية. ويمكن دعم وجود الوكالة ودورها الضئيل من خلال وجود الجماهير الأقوياء. وهكذا العكس، لا يمكن فصل وجود الجماهير عن وجود الوكالة بصفتها مالكة للسلطة في تحريك الجماهير. فلا يمكن أن تكون المجموعتان اللتان تتنافسان بين بعضهما بعضاً على السطح إذا لم يكن لديهما قوة جماعية كافية في كل حركة. وهذه الظاهرة تؤدي إلى التزاحم في التأثير الجماهيري بحيث إنه مهم جداً في التزاحم في الفضاء الديني في آتشيه.

وتقدم هذه الأطروحة العديد من الإسهامات النظرية في تطوير نظرية المنافسة في السلطة الدينية. فرأى هابرماس أن الفضاء العام متأثر بالدين بشكل شديد حتى أن بدأ نظرية الفضاء العام بمصطلح ما بعد العلماني، والقيم الدينية لا تزال موجودة في الفضاء العام في الغرب. وفي التطورات اللاحقة، بدأ إيكلمان وسافاتور مفهوم الإسلام العام الموجه نحو الاحتياجات المشتركة في المجتمع الإسلامي، حيث تحاول كل سلطة نامية على تحقيق نفس الهدف. وأما المنافسة في السلطة الدينية التي حدثت في آتشيه فقد تطور فهم المنافسة في السلطة الدينية وأصبح أوسع، سواء كان في السيطرة على الأماكن العامة الدينية (التسهيلات للعبادة)، والتأثير على السياسات الدينية، أو التزاحم في النفوذ الجماهيري .

الكلمات المفتاحية: علماء الداية (Dayah)، السلفي-الوهابي، المنافسة في السلطة، الفضاء العام الديني

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta‘ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta‘ayyin</i>

### C. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	A	مَنْ نَصَرَ وَقَاتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>

<i>Kasrah</i>	I	كم من فئة	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	U	سدس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa šulus</i>

#### D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	Ā	فَتَّاح رَزَّاق مَنَّان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	Ī	مَسْكِين وَفَقِير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	Ū	دَخُول وَخُرُوج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

#### E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	Aw	مولود	<i>Maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	Ai	مُهَيْمِن	<i>Muhaimin</i>

#### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لَفْنِ شِكْرَتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةَ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

## G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

## H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “*al-*”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

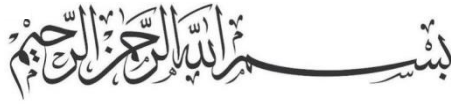
Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “*l*” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syāzarāt az-ẓahab</i>







---

== KATA PENGANTAR ==

“Sejak jaman nabi sampai kini, tak ada manusia yang bisa terbebas dari kekuasaan sesamanya, kecuali mereka yang tersisihkan karena gila. Bahkan pertama-tama mereka yang membuang diri, seorang diri di tengah-tengah hutan atau samudera masih membawa padanya sisa-sisa kekuasaan sesamanya. Dan selama ada yang diperintah dan memerintah, dikuasai dan menguasai, orang berpolitik.”

— Pramoedya Ananta Toer, House of Glass —

Bagi banyak orang, ‘agama’ adalah kebutuhan hidup yang tak ubahnya seperti makanan yang dikonsumsi manusia setiap hari. Tidak terkecuali bagi masyarakat Aceh, bahkan agama melebihi sebagai kebutuhan, melainkan sebagai tujuan hidup. Dua hal yang berbeda, antara ‘kebutuhan hidup’ dan ‘tujuan hidup’. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, bisa saja ia akan melakukan usaha yang keras bahkan melanggar aturan yang ada agar kebutuhan hidupnya terpenuhi—walaupun kemudian ia harus menerima hukuman atas apa yang ia langgar. Kebutuhan hidup dapat saja berubah sesuai perkembangan, selama esensi dari kebutuhan hidup itu tidak berubah. Berbeda dengan ‘tujuan hidup’ yang merupakan capaian akhir dari kehidupan yang harus ia tanamkan dan dapatkan sejak kehidupan dimulai. Semua jalan akan ditempuh untuk mencapai tujuan, jika ada yang berusaha untuk menghalangi tujuan tersebut, maka tak jarang pertikaian dan peperangan pun akan terjadi.

Sehingga beragama bagi banyak orang bukanlah hal yang biasa, bahkan tak jarang menerobos sekat dan batas kemanusiaan. Doktrin agama yang bersifat *ilahiyah* terkadang menegaskan nilai-nilai *insaniyah* yang seharusnya menjadi bagian dari agama itu sendiri. Allah menurunkan Islam melalui rasul-Nya Muhammad sebagai petunjuk kepada umat manusia, di mana manusia memiliki amanah

untuk dapat membangun hubungan dengan sesama (*hablum minannas*) dan membangun hubungan dengan sang Khaliq (*hablum minallah*). Menuju Allah tidak seharusnya mengabaikan manusia, menolak perbedaan, melainkan menjadikan Allah sebagai tujuan dengan menjunjung tinggi *sunnatullah* yang telah Allah tetapkan.

Disertasi ini merupakan awal usaha peneliti untuk memahami kebutuhan dan tujuan manusia dalam beragama. Fenomena yang terjadi di Aceh antara ulama dayah dan salafi-wahabi merupakan pelajaran yang sangat mendalam, walaupun disertasi ini hanya mampu memotret dari sedikit ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Kuasa terhadap otoritas keagamaan yang dimiliki setiap kelompok bukanlah sesuatu yang dipahami secara absolut kebenarannya dan dapat dipaksakan pada semua orang. Disertasi ini tidak akan menjadi sebuah bacaan yang menarik secara ilmiah, jika penulis tidak mendapatkan bimbingan, motivasi, arahan, dukungan moril dan materil dari semua pihak. Izinkan melalui kata pengantar ini peneliti menyampaikan ucapan *takzim* dan terimakasih tersebut kepada;

1. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa melalui MORA Scholarship. Semoga program ini kedepan menjadi lebih baik dalam menghasilkan para pembelajar yang berkualitas dan berdidikasi tinggi.
2. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., yang juga merupakan salah seorang dosen peneliti yang menginspirasi dan membuka cakrawala berfikir mahasiswa-nya. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag, Ketua Program Studi S3 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Bapak Ahmad Rafiq, S.Ag, M.Ag, MA, Ph.D. dan seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi peneliti sejak pertama melanjutkan pendidikan doktoral ini hingga selesai.
3. Promotor, Prof. Dr. Irwan Abdullah, yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi setiap kali melakukan bimbingan. Kendatipun ditengah kesibukannya yang luar biasa, setiap waktu bertemu beliau adalah ruang inspirasi dalam setiap tulisan disertasi ini. Ko-Promotor, Dr. Moch Nur Ichwan, MA, yang setiap waktu membuka pintu rumahnya untuk berdiskusi. Tidak sah rasanya jika bimbingan tidak datang ke kediaman beliau, sama halnya juga dengan Prof. Irwan, kami berdiskusi

panjang lebar hingga tengah malam untuk menemukan alur dan gagasan dalam setiap pembahasan disertasi ini.

4. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, MA, M.Phil, Ph.D, selaku penguji yang membuat peneliti berdecak kagum dan kewalahan dalam setiap masukannya yang sangat berarti. Saya akan merindukan setiap saran dan masukan beliau dengan suara yang sedikit tinggi yang kerap membuat peneliti ter-*giang-ngiang* pada setiap proses revisi. Dr. Reza Idria, MA, selaku penguji penulis yang sangat detil membaca setiap lembaran disertasi ini. Masukan dan sarannya sejak ujian tertutup menjadikan peneliti lebih hati-hati dalam menulis dan menyampaikan gagasan. Dr. Najib Kailani, MA, selaku penguji yang banyak memberikan masukan dan saran pada kajian teoritis. Kajian teoritis adalah kelemahan yang harus segera peneliti perbaiki dan tingkatkan dalam berbagai kajian akademis.
5. Para Narasumber/ informan peneliti, baik dari kelompok Ulama Dayah, maupun salafi-wahabi, yang tidak penulis sebutkan namanya satu-per-satu. Atas data, informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan yang telah diberikan—semoga Allah membalas dengan kebaikan yang lebih besar.
6. Teman-teman Studi Islam angkatan tahun 2018, Mas Bayu, Umam, Gus Ali Fikri, Kyai Bahrin, Gus Sule, Mas Kyai Dr. Andi, Bu Dr. Eva, Romo Suryo, Romo Meran, Yadri, Ali, Cak Ruru, Huda, Ifan. Ayo teman-teman kita selesaikan segera Studi S3 ini. Teman-teman seangkatan Pascasarjana, Kyai Harir Muzaki, Rahayu Subakat, Nyai Itsla, Gus Miftah, Buya Dr. Syamsul, Ustadz Wahyu Mulyadi, Gus Hamzah, Zainal, dan Kyai Nasichin. Benaran gak seru S3 di Yogya tanpa kalian semua...
7. Patriot, Cafee ilmiah yang kerap menghimpun para intelektual dibawah binaan Prof. Irwan Abdullah. Di cafee ini kami menyeduh ide-ide dan inspirasi melalui secangkir kopi gayo, Prof Irwan mempertemukan banyak gagasan dan tokoh-tokoh penting, tidak hanya untuk keilmuan tapi juga hubungan dan jaringan. Kalian adalah bagian dari proses ini semua; Abu Mugni, Kak Cut, Aa Riduwa, Syekh Fairusy, Kak Fira, Bang Dedi, Bang Azwar, Akmal, dan Doto Masrizal. Begitu juga Anomie Coffe, Warung Kopi Urban yang penuh inspirasi, terimakasih mas Tomi (*almarhum*), semoga ini semua menjadi amal jariyah yang dapat memberatkan amal timbangan

kebaikan di akhirat kelak. Kelompok Diskusi Malam Sabtu. Syekh Yaser Arafat yang selalu memandu dan menginspirasi setiap gagasan dan guyonan yang disampaikannya, tidak terkecuali untuk disertasi ini.

8. Keluarga Aceh Besar Yogyakarta (KABY) dan Himpasay, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta. Kedua lembaga ini kerap menjadi ruang diskusi peneliti sejak S2 dalam menelurkan ide-ide dan gagasan, dan tak jarang menjadi penghibur dan pelepas kangen ketika rindu pada kampung halaman. Kebersamaan bersama kalian akan terus dalam ingatan.
9. IAIN Langsa. Para Pimpinan, kolega, teman sejawat, teman diskusi dan berbagai unsur yang telah menjadi bagian dari kehidupan peneliti. Dukungan dan saran yang konstruktif selalu menjadi langkah dimana peneliti dapat menyelesaikan program studi ini.
10. Irwan Abdullah Scholar (IAS), adalah sarana inspirasi peneliti dalam mengembangkan diri secara akademis dan membangun kematangan diri dalam bersikap. Sulit untuk melupakan Prof Irwan, mas Hasse, mas Saifuddin, mas Taqim, Bang Prof. Zai dan para *Anggle* yang selalu ramah menyapa.
11. Para penghubung dan narahubung peneliti dalam menemukan *puzzle-puzzle* data yang terserak dalam berbagai fenomena di Aceh; Ustadz Mujtahid, Ustadz Edi Asyek, Noval, Alkaf, Ihsan, Ifrizal, Zubir, Yusuf, Sehat, Fahrian, Ustadz Ramli, dan Eka. Peran kalian sangat mempengaruhi ketersediaan data dalam penelitian ini.
12. Ayahanda H. Husni Syam (*Alm*) dan Ibunda Hj. Bukhtariah, sosok Ibu yang sangat penyabar dalam setiap waktu & kesempatan. Doa mu yang selalu ku pinta, tak terkecuali disetiap sambungan telpon, semoga kami semua anak-anak mu dapat terus berbakti pada mu.
13. Istri tercinta Noni Deviana, S.Sos.I, keberadaan mu sangat menentukan setiap waktu dan proses pendidikan doktoral ini. Ketulusan dan kesabaran mu turut mengantarkan peneliti hingga pada titik ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita dimasa yang akan datang. Anak-anak tersayang; Faiz Al Muzayyan, Mumtaz el Afkar, Putroe Zamharira, dan Abdul Mufied el Fadhl. Terima kasih anak-anak ku, kalian adalah semangat dan harapan, maafkan Abi karena '*keegoisan*' ini

telah menyita waktu kita bermain dan bersandau-gurau. Semoga proses ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk kalian dimasa-masa yang akan datang.

Tidak ada yang dapat membalas kebaikan-kebaikan yang telah bapak-Ibu, rekan, teman, sahabat berikan dalam mendukung hingga selesainya proses pendidikan doktoral ini. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan tersebut, dengan sebaik-baik kebaikan

Akhirnya, peneliti memohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan yang telah peneliti lakukan. Semoga ini semua menjadi *amal jariyah* kita semua dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 26 November 2021

**Peneliti,**

**NOVIANDY HUSNI**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN &amp; HALAMAN PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIARISME</b> -----	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN REKTOR</b> .....	<b>v</b>
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN PROMOTOR</b> .....	<b>vii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xix</b>
<b>KATAPENGANTAR</b> .....	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxxii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxxv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxxvi</b>

### **BAB I**

<b>Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kajian Kepustakaan .....	10
E. Kerangka Teoritis .....	22
F. Metode Penelitian .....	30
G. Sistematika Penulisan .....	37

### **BAB II**

<b>Islam dan Keulamaan di Aceh</b> .....	<b>41</b>
A. Aceh dalam Sejarah Keulamaan .....	44
B. Perkembangan Pemahaman Keulamaan .....	52
C. Peran Ulama dalam Dinamika Religiositas di Aceh --	59

### **Bab III**

<b>Aswaja dan Salafi-Wahabi di Aceh -----</b>	<b>65</b>
<b>A. ASWAJA Gerakan Islam Tradisional di Aceh -----</b>	<b>68</b>
1. Pereodeisasi Dayah sebagai Gerakan Aswaja di Aceh -----	69
2. <i>Aswaja</i> sebagai Identitas Ulama Dayah -----	76
3. Perkembangan Gerakan Aswaja dan Ulama Dayah -----	80
<b>B. Gerakan Salafi-Wahabi di Aceh-----</b>	<b>82</b>
1. Periodeisasi Pertumbuhan Salafi-wahabi di Aceh -----	85
2. Konstruksi Gerakan Keagamaan Salafi-wahabi--	89
3. Perkembangan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh-----	97

### **BAB IV**

#### **Kontestasi Ruang Publik Agama di Aceh: Perebutan**

<b>Ruang Ibadah -----</b>	<b>109</b>
<b>A. Kosmologi Doktrin dalam Masyarakat Aceh-----</b>	<b>112</b>
1. Islam: <i>Itiqad, Syariah</i> dan <i>Tasawuf</i> -----	113
2. Ahlusunnah <i>Waljamaah Itiqad</i> Ajaran di Aceh -	118
3. Ahlusunnah <i>Waljamaah</i> sebagai Identitas Kutural dan Politik Identitas -----	125
<b>B. Ritual Keagamaan: Upaya Standarisasi Beragama</b>	<b>128</b>
1. Ritual Konstruksi Islam Mazhaby-----	130
2. Syafi'iyah; Mazhab Fiqh Masyarakat Aceh -----	133
3. Syafi'iyah dalam Pemahaman Ibadah antara Ulama Dayah & Salafi Wahabi di Kota Banda Aceh -----	136
<b>C. Tempat Ibadah: Peneguhan Eksistensi Gerakan -</b>	<b>139</b>
1. Peta Ideologi Masjid di Kota Banda Aceh -----	141
2. Masjid sebagai Lokus Gerakan Baru Ideologi Massa -----	144
3. Masjid dalam Kontestasi Otoritas Keagamaan --	148



## **BAB V**

<b>Kontestasi Kebijakan dalam Ruang Publik Agama -----</b>	<b>157</b>
<b>A. Design Kebijakan -----</b>	<b>161</b>
1. Historisitas Perumusan Kebijakan Syariat Islam	164
2. Keterlibatan Ulama dalam Perumusan Qanun- Qanun Syariat Islam -----	167
3. Relasi Lahirnya Qanun Syariat dengan Kebutuhan Masyarakat Aceh -----	169
<b>B. Implementasi Kebijakan Syariat Islam -----</b>	<b>172</b>
1. Paradigma Implementasi Syariat Islam di Aceh -	175
2. Perjalanan Implementasi Syariat Islam -----	177
3. Religiositas dan Dinamika Implementasi Syariat Islam -----	184
<b>C. Kontrol Kebijakan: Upaya Penguatan dan Pelemahan     Kebijakan -----</b>	<b>189</b>
1. Ulama Dayah Sebagai Kontrol Kebijakan Syariat Islam -----	191
2. Salafi-Wahabi Gerakan Kontrol Alternatif Syariat Islam -----	194
3. Kontrol Kebijakan Syariat Islam di tengah Kontestasi Otoritas -----	197

## **BAB VI**

### **Kontestasi Otoritas Keagamaan; Perebutan Pengaruh**

<b>Massa-----</b>	<b>205</b>
<b>A. Kekuatan Massa dalam Otoritas Keagamaan -----</b>	<b>207</b>
1. Otoritas Ulama sebagai sumber Legitimasi Syariat -----	209
2. Massa sebagai Penentu Gerakan Keagamaan ----	211
3. Kuasa dan Dominasi Massa dalam Peneguhan Otoritas Keagamaan -----	215

<b>B. Agensi Otoritas Keagamaan dalam Mobilitas Massa</b>	<b>220</b>
1. Agensi Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Aceh	221
2. Pertarungan Agensi Teungku dan Ustadz di Kota Banda Aceh	224
3. Agensi sebagai Penggerak Massa dalam Medan Sosial, Politik dan Keagamaan	226
<b>C. Otoritas Keagamaan dalam Pengaruh Massa</b>	<b>228</b>
1. Legitimasi Pelaksanaan Syariat Islam dan tuntutan Massa di Kota Aceh	229
2. Otoritas Kebijakan Agama dalam Legitimasi Ulama	231
3. Kebijakan Sosial dan Politik antara Legitimasi Agama dan Massa	234
<b>BAB VII</b>	
<b>Penutup</b>	<b>237</b>
A. Kesimpulan	237
Temuan Penelitian	238
Refleksi Teoritis	240
B. Saran: Penelitian Lanjutan	242
<b>Daftar Kepustakaan</b>	<b>243</b>
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	<b>271</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Poster POSTIM ‘Pondok Studi Islam Mahasiswa,’ 104

Gambar 2 Ciri-ciri Masjid Sunnah, 145

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Legitimasi Otoritas, 30
- Tabel 2 Ustadz Salafi-Wahabi dan Afiliasinya di Kota Banda Aceh, 99
- Tabel 3 Lembaga Pendidikan yang didirikan oleh Kelompok Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, 103
- Tabel 4 Qanun Syariat Islam yang telah disahkan Gubernur dan DPR Aceh, 170
- Tabel 5 Klasifikasi Qanun Syariat Islam yang telah disahkan Gubernur dan DPR Aceh, 171
- Tabel 6 Titik-titik Aktifitas kelompok Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, 195

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Aceh merupakan provinsi yang memiliki latar historis yang berbeda dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Perbedaan sekaligus kekhasan Aceh terejawantahkan di dalam kehidupan masyarakatnya yang sarat dengan nilai-nilai keislaman sebagai *ghirah* perjuangan terhadap pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini, kekhasan tersebut semakin menonjol ketika masyarakat Aceh mengukuhkan teritori sebagai kawasan berbasis syariat Islam.<sup>1</sup>

Dua dekade telah berlalu, ketika Aceh telah mendeklarasikan pelaksanaan syariat Islam yang diiringi dengan berbagai peraturan dan turunannya.<sup>2</sup> Ironi, dengan tenggang waktu 20 tahun penerapan syariat Islam di Aceh belum berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga mengecewakan banyak kalangan ummat Islam di Aceh sendiri, di samping juga menuai pro-kontra dalam pelaksanaannya di lapangan.<sup>3</sup> Bahkan penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sangat beresiko ketika kecenderungan praktik keagamaan menunjukkan realitas yang kontra produktif dan intoleran terhadap progresivitas

---

<sup>1</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, 'The Application of Islamic Law in Indonesia; The Case Study of Aceh', *International Journal Of Indonesian Islam-Australia*, Vol 01, Number 01, June 2007 (2007); R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (United Kingdom: Oxford University Press, 2013).

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU RI Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang melahirkan Kanun Aceh Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, UU No 18 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan seterusnya di ikuti oleh UU RI pendukung lainnya

<sup>3</sup> Constance Johnson, 'Indonesia: Aceh Stoning Provision Deleted, Other Shariah-Influenced Rules Controversial |Global Legal Monitor', 2013 <<http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-aceh-stoning-provision-deleted-other-shariah-influenced-rules-controversial/>> [accessed 23 January 2019].

ilmu pengetahuan kontemporer serta semangat humanisme dan pluralisme postmodern yang mengusung empat tema sentralnya, yaitu: demokrasi, globalisasi, HAM, dan gender.<sup>4</sup>

Tidak hanya karena pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih belum mengakomodir kebutuhan masyarakat di sana, bahkan pelaksanaannya pun masih cenderung bersifat politis dan tidak substantif dalam mengakomodir pemahaman keislaman komunitas tertentu. Hal ini pula salah satu yang menjadikan pelaksanaan syariat di Aceh sejauh ini, baru sebatas simbol-simbol yang masih jauh dari substansi penerapannya. Aplikasi syariat Islam di Aceh terlihat pada pengesahan *qanun-qanun* yang lebih menuntut pelaksanaan syariat dari bawah, bukan sebaliknya dimulai dari para pemimpin dan pelaksana tugas pemerintah. Hal ini mengesankan *qanun-qanun* yang dilahirkan bagai pisau yang memotong ke bawah, dan hanya berlaku pada masyarakat bawah.<sup>5</sup>

Lebih jauh dari itu penulis memandang pelaksanaan syariat di Aceh saat ini sudah berada dalam ruang politik yang lebih luas dibandingkan satu dekade sebelumnya. Peristiwa demi peristiwa di Aceh mulai mengarah pada perseteruan dan perebutan wacana publik dalam mengkonstruksi paham sosial-keagamaan di Aceh. Oktober 2015 Wakil Gubernur Aceh Muzakkir Manaf digelari ‘Umar Bin Khaṭṭāb akhir zaman’ dalam demonstrasi yang dilaksanakan oleh kelompok yang mengaku *Ahl al-Sunnah al-Jamā’ah (Aswaja)* untuk menekan pergerakan Salafi- Wahabi.<sup>6</sup> Demonstrasi ini berawal dari insiden keributan dalam pelaksanaan shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, di mana

---

<sup>4</sup> Candra Perbawati, ‘Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam’, *AL-ADALAH*, 12.2 (2015), 843–54 (p. 848); Anton Jamal, dkk, ‘Pemetaan Syariat Islam di Aceh Problematika dan Solusi’, *Istiqro*, 16.01 (2018), 103–38 (p. 106).

<sup>5</sup> Hasil diskusi dan Wawancara, Alyasa’ Abu Bakar (Guru Besar Hukum Islam IAIN Ar-Raniry dan Tim Ahli Pansus XII DPR Aceh, Banda Aceh, 9 September 2011, dalam Noviandy, *Hak Asasi Manusia Di Negeri Syariat “Tinjauan Etika Politik Terhadap Rancangan Kanun Jinayah Di Aceh* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

<sup>6</sup> ‘Ini Dia “Umar Bin Khaṭṭāb” Akhir Zaman’, *Serambinews.Com*, 2015 <<http://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/ini-dia-umar-bin-khattab-akhir-zaman.>>.

kelompok yang mengatasnamakan FPI mengambil alih prosesi azan Jumat menjadi 2 (dua) kali yang berbeda dengan biasanya. Tidak hanya sampai di situ, mereka menginterupsi khatib untuk menggunakan tongkat dan mengulang khutbah Jumat (*mualat*)<sup>7</sup>. Langkah mendeklarasikan Wakil Gubernur Aceh kala itu sebagai ‘Umar bin Khaṭṭāb akhir zaman merupakan usaha kelompok Islam tradisional yang terdapat di Aceh yang selama ini diafiliasikan dengan kelompok dayah. Usaha ini dilakukan tidak lain merupakan upaya pelegalan pelarangan aktivitas kelompok Salafi-Wahabi yang saat ini mulai mengakar di Aceh.<sup>8</sup>

Hal yang terjadi kemudian adalah maraknya perebutan dan penyerangan Masjid yang dilakukan oleh kelompok dayah melalui FPI yang tersebar di seluruh Aceh. Perebutan Masjid Al-Izzah di Cot Seurani, Krueng Mane Aceh Utara (bukan Masjid Muhammadiyah), penyerangan Masjid Taqwa Muhammadiyah Bireun,<sup>9</sup> perebutan Masjid Bustanul Jannah, Ajun, Aceh Besar, pengusiran pengajian kelompok Salafi-Wahabi di Masjid Al-Fitrah Keutapang,<sup>10</sup> Masjid Jabir al-Ka’by di Meulaboh<sup>11</sup> dan terakhir

---

<sup>7</sup> Mualat dalam prosesi khutbah jumat di Aceh diartikan dengan bersambungny aktivitas pembacaan rukun khutbah. Adapun rukun khutbah Jumat terdiri dari; Puji-pujian kepada Allah, Shalawat kepada nabi, Wasiat atau nasehat kepada kaum muslimin, membaca ayat al-Quran, dan ditutup dengan doa. Kelima rukun khutbah tersebut diwajibkan dibaca secara bersambung tanpa berselang dengan bahasa asing atau harus dibacakan dengan bahasa arab. Jika sudah diselengi dengan bahasa asing selain bahasa arab, maka khatib harus mengulangnya sebelum menutup khutbah. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka khutbah jumat dan prosesi jumat secara keseluruhan dianggap tidak sah

<sup>8</sup> Kelompok Islam Tradisional yang penulis maksud dalam disertasi ini adalah komunitas dayah atau pesantren tradisional yang tergabung dalam berbagai organisasi, di antaranya adalah Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Rabithah Thaliban Aceh, Himpunan Ulama Dayah Aceh, dan para santri dayah. Kelompok ini menamakan dirinya dengan Pembela Aswaja dalam pengertian berakidah Asy’ariyah dan Maturidiyah, beribadah sesuai dengan mazhab Syafi’i dan bertasawuf dengan ajaran Imam al-Ghazali.

<sup>9</sup>Miswar Khairil, ‘Tragedi Samalanga dan Runtuhnya Kearifan’, *Serambi Indonesia* (Banda Aceh, 2017) <<http://aceh.tribunnews.com/2017/10/27/tragedi-samalanga-dan-runtuhnya-kearifan>> [accessed 24 January 2019].

<sup>10</sup> BBCNews, ‘Ustadz Firanda ditolak di Aceh karena “lebih cenderung ke Wahabi”’, *BBC News Indonesia*, 14 June 2019, section Indonesia

keributan dan pengusiran penceramah yang dianggap bagian dari kelompok Salafi-Wahabi di Masjid Oman<sup>12</sup> dan masih banyak perebutan Masjid lainnya yang tidak tercatat oleh media. Belum lagi penutupan dan pengusiran warga Salafi-Wahabi yang tergabung dalam sebuah yayasan di Pekan Bada-Banda Aceh dan Pesantren As-Sunnah di Lampeuneurut-Aceh Besar.<sup>13</sup> Dan berbagai bentuk diskriminatif lainnya berdasarkan pengakuan jamaah pengajian; menghidupkan motor dengan suara keras, ejekan celana cingkrang dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Ditambah lagi dengan lahirnya fatwa Majelis Perwakilan Ulama Provinsi Aceh<sup>15</sup> bahwa aliran Salafi-Wahabi<sup>16</sup> merupakan

---

<<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48617536>> [accessed 22 August 2019].

<sup>11</sup> Acehtrend, 'Tata Cara Ibadah dan Pengajian di Masjid Jabir Al-Ka'biy Meulaboh', *AceHTrend.Com*, 2019 <<https://www.acehtrend.com/2019/08/08/tata-cara-ibadah-dan-pengajian-di-masjid-jabir-al-kabiy-meulaboh/>> [accessed 21 August 2019].

<sup>12</sup> 'Pemkot Banda Aceh Ambil Alih Kepengurusan Masjid Oman, Pasca Pembubaran Pengajian Ustaz Farhan - Barometernews.Id' <<https://barometernews.id/pemko-banda-aceh-ambil-alih-kepengurusan-masjid-oman-paska-pembubaran-pengajian-ustaz-farhan/>> [accessed 28 January 2020].

<sup>13</sup> Fauzi Cut, 'Terkait Peristiwa Di Lam Awee, Abdul Qadir Jailani: Saya Difitnah', *AceHTrend.Com*, 2016 <<https://www.acehtrend.com/2016/04/01/terkait-peristiwa-di-lam-awee-abdul-qadir-jailani-saya-difitnah/>> [accessed 24 January 2019].

<sup>14</sup> Rizky Dasilva, *Pembakaran Tapak Masjid Taqwa Muhammadiyah*, 2017.

<sup>15</sup> MPU Aceh, 'Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengalaman Dan Penyiaran Agama Islam Di Aceh' (Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 2014) <<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/11/download-keputusan-mpu-aceh-tahu>>.

<sup>16</sup> Salafi-wahabi merupakan gerakan keagamaan yang berbasis di Saudi Arabia dengan pemikiran Muhammad ibn 'Abd Wahhab (1703-1792), ia terinspirasi dari dari ajaran Taqiy al-Din Ibn Taymiyyah (1263-1328). Gagasan Muhammad Ibn 'Abd Wahhab dikembangkan sejak abad 18 berkomitmen menjalankan ajaran Islam secara murni dan mendobrak berbagai takhayul-takhayul dan praktik sufi yang dianggap bid'ah di kalangan masyarakat arab Khaled Abou El Fadl, *Sejarah Wahabi & Salafi: mengerti jejak lahir dan kebangkitan di era kita* (Serambi Ilmu Semesta, 2015); Noorhaidi Hasan, 'The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development', *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 27.1 (2007), 83–94 (pp. 89–90); David Commins, 'From Wahhabi to Salafi', in *Saudi Arabia in Transition*, ed. by Bernard



aliran sesat, yang dilengkapi bentuk pemahaman dan praktik dalam beribadahnya.<sup>17</sup> Keberadaan dan kebebasan kelompok Salafi-Wahabi semakin terdesak, walau tetap melaksanakan berbagai kegiatan baik terbuka maupun tertutup. Bahkan kelompok Salafi-Wahabi pun menantang kembali untuk berdebat secara terbuka dengan MPU Aceh yang telah mengeluarkan fatwa akan kesesatan—tidak ada konfirmasi dari MPU sampai hari ini.<sup>18</sup> Kondisi ini mendesak MPU Aceh untuk melaksanakan *muzakarah* Ulama seluruh Aceh,<sup>19</sup> tentunya hal ini mengundang perhatian berbagai kelompok Islam yang terdapat di Aceh yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Hasil keputusan *muzakarah* tersebut juga terlihat lebih memihak pada cara pandang kelompok dayah, di samping juga memberikan sedikit kelonggaran kepada kelompok yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan kelompok dayah.<sup>20</sup>

Secara kasat mata dan tersirat perseteruan yang terjadi adalah antara kelompok dayah yang menggunakan tangan Front Pembela

---

Haykel, Thomas Hegghammer, and Stéphane Lacroix (New York: Cambridge University Press, 2015), 151–66.

<sup>17</sup>‘MPU Sosialisasikan Fatwa Nomor 9/2014 - Serambi Indonesia’, 2014 <<http://aceh.tribunnews.com/2014/08/22/mpu-sosialisasikan-fatwa-nomor-92014>> [accessed 23 January 2019].

<sup>18</sup>Adam Haris, ‘Buku Putih Pembahasan Ilmiah Fatwa MPU Aceh No 9 Tahun 2014’ (Kelompok Salafi, 2014); Serambinews, ‘Ini Klarifikasi Salafi’, *Serambi Indonesia*, 2014 <<http://aceh.tribunnews.com/2014/08/22/ini-klarifikasi-salafi>> [accessed 23 January 2019].

<sup>19</sup> Muzakarah Ulama adalah pertemuan para ulama untuk memperbincangkan atau mendiskusikan permasalahan keagamaan yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Muzakarah Ulama se-Aceh bertujuan memberikan pemahaman yang luas khususnya masyarakat Aceh, masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, terutama masalah *furū’iyah ijthadiyah*. Pemahaman yang mendalam dan terbuka terhadap perbedaan pendapat para ulama mazhab perlu dikembangkan di tengah masyarakat, guna menghindari sifat pemaksaan kehendak, sikat saling fitnah, dan saling menuduh tanpa dasar (dalil), serta klaim kebenaran satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan fiqh dan praktik ibadah. Tim, *Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh*, II (Banda Aceh: Naskah Aceh & Dinas Syariat Islam, 2017).

<sup>20</sup>‘MPU ACEH | Ini Hasil Muzakarah Ulama Di MPU Aceh’, 2015 <<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2015/10/27/30/ini-hasil-muzakarah-ulama-di-mpu-aceh.html>> [accessed 23 January 2019]; Tim.

Islam (FPI) Aceh berseteru dengan kelompok Salafi-Wahabi. Namun di balik itu, penulis melihat menggelindingnya isu Salafi-Wahabi yang semakin besar menyeret banyak hal dalam ruang politik yang lebih luas. Salah satunya adalah penyeragaman keyakinan, praktik ibadah, sosial-kegamaan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini menyeret banyak pihak, tidak hanya Muhammadiyah, bahkan masjid pemerintah pun yang memiliki ritual ibadah yang sudah dipraktikkan dari masa ke masa juga menjadi sasaran perebutan massa.

Perebutan dan kontestasi otoritas kegamaan<sup>21</sup> secara masif terjadi pada level elit. Perebutan masjid, penyeragaman ritual kegamaan, dan demonstrasi penolakan Salafi-Wahabi hanya penampakan dari fenomena dari luar saja. Jika kita merujuk pada kondisi Aceh sebelum reformasi, atau beberapa dekade sebelumnya, pemegang otoritas sosial-kegamaan masih bersifat tunggal.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Otoritas Keagamaan dalam rancangan penelitian ini, peneliti meminjam gagasan Max Weber 'a certain quality of an individual personality by virtue of which he is set apart from ordinary men and treated as endowed with supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional qualities'. Zulkifli Zulkifli, 'The Ulama in Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37.1 (2013). Walaupun kemudian peneliti melihat otoritas keagamaan di Aceh berkelindan dengan kekuasaan dengan meminjam kajian teoritis yang digagas oleh Michel Foucault.

<sup>22</sup> Kebijakan Sosial Keagamaan masyarakat Aceh cenderung merujuk pada ulama dayah. Otoritas karismatik ulama dayah lebih kuat melekat pada budaya masyarakat di sana sejak perkembangan dayah di Aceh abad ke 8, dalam Juhari Juhari, 'Respon Ulama Dayah Darussa'adah Terhadap Problema Sosial Keagamaan Di Aceh', *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 22.2 (2016): 80; Dalam pandangan Habermas, ruang publik yang selama berabad-abad dikuasai dan dikendalikan oleh kaum borjuis telah berubah menjadi arena pertukaran pemikiran-pemikiran kritis yang tidak bisa lagi diklaim sebagai milik perseorangan. Setiap orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dapat mengartikulasikan ide-ide yang mereka miliki, baik secara langsung maupun tidak. Habermas juga memandang ruang publik dalam pemahaman "a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed. Acces is guaranteed to all citizens. A portion of the public sphere comes into being in every conversation in which private individuals assemble to form a public body." Tidak berbeda apa yang didefinisikan oleh Charles Taylor, ruang publik merupakan ruang bersama dimana setiap orang dapat bertemu melalui berbagai media dan mendiskusikan banyak hal tentang kebutuhan mereka serta dapat membangun banyak kesamaan dalam berfikir. Walaupun Habermas mendapat kritikan keras

Perkembangan Aceh pascareformasi, Tsunami, dan perdamaian antara GAM dan menjadikan Aceh lebih terbuka. Putra-putri Aceh mendapat kesempatan, baik secara mandiri maupun beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Wajah Aceh, suka tidak suka, mau tidak mau, Aceh menjemput perubahan. Khususnya konstruksi paradigma sosial-keagamaan dalam masyarakat Aceh. Kepulangan putra-putri Aceh dari berbagai negara di belahan dunia dari menjemput ilmu pengetahuan memberikan warna baru terhadap otoritas sosial-keagamaan yang terdapat di Aceh. Khususnya para alumni Timur Tengah yang memiliki konstruksi pemahaman sosial-keagamaan yang berbeda dengan masyarakat Aceh secara umum.<sup>23</sup> Pada awalnya gerakan ini tidak berbasis pada masyarakat lokal. Hal ini tak ubahnya sama seperti yang disampaikan oleh Alfian, pasca-terjadi perseteruan antara Ulee Balang dengan Ulama dan pembentukan gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) tahun 1920. Kekurangan kader ulama yang berparadigma modern sangat dirasakan, bertebaranlah putra-putri Aceh ke berbagai daerah di Indonesia hingga ke Timur Tengah untuk mendalami ilmu

---

dari Eickelman dan Salvatore yang tidak memasukkan agama dalam ruang publik. Habermas mengabaikan gerakan pietisme (kesalehan) dan kebangkitan agama yang begitu sukses terjadi, tidak hanya di Indonesia, Jerman serta di Skandinavia dan negara-negara Protestan lainnya di Eropa Barat, dalam Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere 'An Inquiry into a Category of Bourgeois Society'*, trans. by Thomas Burger (Germany: MIT Press, 1989); Jürgen Habermas, 'The Public Sphere: An Encyclopedia Article', in *Media and Cultural Studies: Keywords*, ed. by Meenakshi Gigi Durham and Douglas Kellner, *Keywords in Cultural Studies*, 2, Rev. ed (Malden, MA: Blackwell, 2006), 73–78; Charles Taylor, 'Modernity and the Rise of the Public Sphere', *The Tanner Lectures on Human Values*, 14 (1992), 205–60; Dale F. Eickelman and Armando Salvatore, 'The Public Sphere and Muslim Identities', *European Journal of Sociology*, 43.1 (2002), 92–115.

<sup>23</sup> Corak pemahaman sosial keagamaan alumni Timur Tengah juga berbeda-beda, pemahaman para alumni al-Azhar Cairo memiliki kecenderungan yang lebih moderat-walaupun juga terdapat pemahaman yang cenderung keras seperti komunitas salafi-wahabi. Sedangkan alumni Saudi & Yaman cenderung mengadopsi pemahaman Salafi-Wahabi, lihat, Martin van Bruinessen, 'Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the "Conservative Turn" of the Early Twenty-First Century', 2013, 1–20 (pp. 5–6).

pengetahuan agama yang pada akhirnya kembali ke Aceh yang mendirikan dan mengajar di berbagai sekolah Islam modern.<sup>24</sup>

Sekembalinya para alumni Timur Tengah, memberikan pandangan yang berbeda bagi para anggota dan peserta pengajian di berbagai tempat di Aceh. Jika sebelumnya yang mampu membaca dan mensyarahi kitab-kitab Arab hanya dari kalangan kelompok dayah yang sudah mengaji bertahun-tahun, saat ini selain dari kelompok dayah pun memiliki kemampuan yang sama dalam waktu yang relatif cepat. Penjelasan-penjelasan yang diberikan selalu dengan argumentasi yang langsung berlandaskan al-Quran dan hadis sehingga sangat memuaskan para peserta, pengakuan salah seorang peserta pengajian.<sup>25</sup>

Jika sebelumnya pengajian-pengajian di kampung dan kota-kota seluruhnya diisi dan diasuh oleh kelompok dayah, hari ini sebagian besar kelompok-kelompok pengajian kota, sebagian kelompok pengajian di perkampungan diisi oleh kelompok non-dayah. Tidak hanya itu, jika dulu semua kelompok pengajian diisi dengan pengkajian mazhab Syāfi'ī dalam pemahaman fiqh, Asy'ariyah dalam pemahaman tauhid dan pendapat kelompok dayah saja. Saat ini hal tersebut mengalami perubahan yang signifikan, kelompok non-dayah mampu menghadirkan pemahaman berbagai mazhab dalam kajian fiqh, dan berbagai pandangan dalam kajian tauhid dan ilmu kalam. Fenomena ini yang kemudian menurut penulis menjadikan kelompok dayah mendukung sepenuhnya Surat Edaran Plt. Gubernur tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari i'tiqad *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang Bersumber Hukum Mazhab Syāfi'iyah<sup>26</sup> yang memanfaatkan kondisi sosial, politik dan keagamaan di Aceh saat itu.

---

<sup>24</sup> Alfian, 'The Ulama in Acehnese Society; A Preliminary Observation', *Southeast Asian Journal of Social Science*, 3.1 (1975), 27-41 (30-35).

<sup>25</sup> Wawancara, Fajriati (Umi Azkiya), Langsa, Januari 2018.

<sup>26</sup> Plt. Gubernur Aceh, 'Surat Edaran No. 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari 'Itiqad Ahl al-Sunnah al-Jama'>'ah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah' (Pemerintah Aceh, 2019); aceh, 'Apresiasi Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh, PDA Minta Kajian Menyimpang Dihentikan | Rakyat Aceh' <<https://harianrakyataceh.com/2019/12/26/apresiasi-surat-edaran->

Deskripsi uraian di atas menjelaskan keberadaan dua kelompok keagamaan yang telah terpolarisasi ini terlihat lebih cenderung membangun sikap intoleran dalam berkontestasi hingga perebutan ruang publik. Baik kelompok tradisional dayah maupun kelompok Salafi-Wahabi saat ini memiliki kekuatan massa, walaupun dengan jumlah yang berbeda—kerap membangun *image* Aceh yang tidak toleran dan pluralis. Hal ini lambat laun akan menjadikan Aceh terus berada dalam pusaran konflik yang berkepanjangan, dengan bentuk dan sifat konflik yang berbeda dari konflik-konflik sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, terlihat bahwa kontestasi otoritas sosial keagamaan kerap terjadi di Aceh. Baik kelompok transnasional Salafi- Wahabi, maupun kelompok tradisional dayah turut serta terlihat dalam kontestasi tersebut dan berujung pada perseteruan. Kontestasi ini tidak hanya terjadi pada tataran jamaah yang berada pada berbagai fasilitas keagamaan, namun juga menjadi gejala sosial baru dalam masyarakat hingga pada ranah sosial politik di Aceh. Dari berbagai fenomena yang terjadi satu dekade terakhir ini, peneliti ingin menelaah beberapa hal yang sifatnya primer sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi kontestasi otoritas keagamaan antara kelompok dayah dengan kelompok Salafi-Wahabi di Aceh?
2. Bagaimanakah bentuk konstruksi otoritas keagamaan terbangun dalam setiap polarisasi kelompok tersebut?

---

plt-gubernur-aceh-pda-minta-kajian-menyimpang-dihentikan/> [accessed 6 February 2020]; 'MABAB Apresiasi Plt Gubernur Terkait Penertiban Pengajian Selain Ahl al-Sunnah al-Jama>'ah - Serambi Indonesia' <<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/28/mabab-apresiasi-plt-gubernur-terkait-penertiban-pengajian-selain-ahlussunnah-wal-jamaah>> [accessed 6 February 2020]; 'LDF Dukung Keputusan Plt Gubernur Aceh Larang Pengajian Selain I'Tiqad Ahl al-Sunnah al-Jama>'ah', *Bangkit bersama rakyat*, 2019 <<https://suaraindonesia-news.com/ldf-dukung-keputusan-plt-gubernur-aceh-larang-pengajian-selain-itiqad-ahlussunah-waljamaah/>> [accessed 6 February 2020].

3. Bagaimanakah kontestasi itu dilakukan oleh dan antar dua kelompok yang terpolarisasi tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, secara umum penelitian ini akan bermanfaat dalam memetakan perkembangan otoritas-otoritas ajaran Islam yang berkembang hingga saat ini. Hal ini menjadi penting sebagai bahan dan masukan bagi pemerintah dalam mengambil dan menyusun kebijakan di sana. Pada sisi yang berbeda penelitian ini juga akan menjelaskan cikal-bakal konflik internal keagamaan Islam—mengingat selama ini syariat Islam di Aceh merupakan solusi dari konflik yang berkepanjangan di sana. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk dapat memberikan penjelasan apa yang menjadi penyebab masyarakat secara keagamaan terpolarisasi serta mengapa terjadi kontestasi dalam perebutan otoritas keagamaan antar kelompok tersebut.
2. Untuk dapat menjelaskan konstruksi paradigma dan dinamika antar kedua kelompok yang berkontestasi, baik itu kelompok transnasional Salafi- Wahabi di Aceh, maupun kelompok tradisional yang berkembang melalui lembaga dayahnya.
3. Untuk dapat menjelaskan bagaimana setiap kelompok yang terpolarisasi ini berperan dan berstrategi, baik itu dalam memanfaatkan relasi kuasa, maupun dalam berkontestasi merebut ruang publik di Aceh.

### **D. Kajian Kepustakaan**

Memperbincangkan Aceh dengan segala bentuk kontestasi otoritas sosial keagamaan yang telah terjadi di dalamnya dari masa ke masa, tidak terlepas dari keberadaan lembaga pendidikan Islam khas Aceh ‘dayah’. Begitu juga dengan perkembangan Salafi-Wahabi, yang itu semua tidak terlepas karena Aceh memiliki ruang publik yang membuka terjadinya kontestasi sosial keagamaan di sana. Kajian kepustakaan ini peneliti membagi kepada empat bagian; 1)

Perkembangan dayah, 2) Perkembangan Salafi-Wahabi, 3) Kontestasi otoritas keagamaan di Aceh, dan 4) Kajian terhadap ruang publik yang telah terjadi di Aceh.

### 1. Perkembangan Dayah

Karena keberadaan pesantren di Indonesia dengan berbagai bentuk dan sebutannya merupakan genealogi dari sistem pendidikan asli Indonesia.<sup>27</sup> Eksistensi ulama dan dayah di Aceh dari masa ke masa merupakan bagian yang sangat penting dari sosial keagamaan itu sendiri. Peran ulama dengan otoritas yang didapatkan melalui lembaga pendidikan dayah menjadikan mereka dapat memposisikan dirinya dalam sosial keagamaan di tengah masyarakat Aceh.<sup>28</sup> Dayah juga menjadi bagian dari gerakan sosial masyarakat Aceh dari berbagai periode, kemampuan kolektif dalam melakukan kaderisasi secara alamiah dapat memahami budaya dan lokalitas dimana mereka berada—memungkinkan gerakan sosialnya lebih berjalan demokratis dan sarat nilai-nilai pendidikan Islam.<sup>29</sup> Dayah juga mengalami perubahan dan pengembangan secara kelembagaan yang lebih profesional dan mengadaptasikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang tetap dengan nilai-nilai Islam. Namun hal ini menarik dayah untuk berada di bawah sistem pemerintah, justru ditakutkan menghilangkan independensi peran yang telah dilakukan selama ini. Keikhlasan, ketulusan, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama dan ilmu akan sulit ditemukan dalam

---

<sup>27</sup> Rusydy Zakaria, 'Overview of Indonesian Islamic Education: A Social, Historical and Political Perspective' (unpublished Thesis, The University of Waikato, 2007) <<https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/2410>> [accessed 13 January 2020]; Azyumardi Azra, 'Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society', *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage (e-Journal)*, 4.1 (2015), 85–114.

<sup>28</sup> Muntasir, 'The Social Role of Ulama Dayah to Aceh Society, Indonesia', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23, Issue 1.1 (2018), 18–24.

<sup>29</sup> Hanafiah Hanafiah, 'Dayah Collectively as a Social Movement', *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 11.1 (2018), 56–64.

pendidikan sekuler.<sup>30</sup> Dalam kajian yang lain disebutkan dayah dapat mengejawantahkan nilai-nilai pendidikan dalam kearifan lokal Aceh; nilai *ta'abbudi*, nilai *akhlaqi*, dan nilai *tabarruqi*. Nilai-nilai disampaikan dengan strategi tradisional, secara ikhlas, reflektif dan tran-internal—hal inilah yang nantinya melahirkan sikap ikhlas, *takzim* pada guru, kebersamaan, kerendahan hati, kreativitas, toleransi, kemandirian, disiplin dan saling menghormati.<sup>31</sup> Oleh karena itu, kekerabatan yang terbangun dalam pendidikan dayah memiliki ciri khas yang tumbuh dari akar rumput berdasarkan kehendak masyarakat; Teungku (guru), santri, orang tua, masyarakat sekitar, hingga pimpinan setempat.<sup>32</sup>

Melihat pada pola dan manajemen kepemimpinan yang diterapkan di lembaga pendidikan tradisional dayah dari waktu ke waktu, lembaga ini telah mengalami perubahan. Sebelumnya pola kepemimpinan dan otoritas sosial di dayah bersifat tunggal yang bertumpu pada pimpinan dayah, perkembangan kemudian menuntut dayah untuk lebih dapat mendistribusikan otoritas pada kepemimpinan kolektif. Baik otoritas dalam pengelolaan dayah maupun pengembangan sosial keagamaan dalam masyarakat.<sup>33</sup> Sistem kepemimpinan dayah dalam melakukan pengelolaan juga terus berevolusi dengan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, konsultatif dan tidak melupakan instruktif.<sup>34</sup> Hal ini memang tidak terlepas bahwasanya keberadaan lembaga pendidikan dayah di Aceh, baik yang sifatnya tradisional maupun

---

<sup>30</sup> Huwaida Huwaida, 'Change and Development in The Acehnese Dayah Salafi (A Case Study)', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3.2 (2015), 279–94.

<sup>31</sup> Abdul Hadi, 'The Internalization of Local Wisdom Value in Dayah Educational Institution', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5.2 (2017), 189–200.

<sup>32</sup> Azra, 'Genealogy of Indonesian Islamic Education'.

<sup>33</sup> Mukhlisuddin Ilyas, dkk, 'Leadership Transformation; Study of Islamic Boarding School (Dayah) in ACEH Province of Indonesia', *Journal of Entrepreneurship Education*, 22.2 (2019) <<https://www.abacademies.org/abstract/leadership-transformation-study-of-islamic-boarding-school-dayah-in-aceh-province-of-indonesia-7811.html>> [accessed 12 January 2020].

<sup>34</sup> Nasir Usman, Murniati Ar, and Marzuki Marzuki, 'The Influence of Leadership in Improving Personnel Performance at Traditional Islamic Boarding School (Dayah)', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4.2 (2016), 205–16.



berbentuk madrasah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Aceh itu sendiri.<sup>35</sup> Begitu halnya pula keterbukaan lembaga pendidikan dayah terhadap perempuan, banyaknya jumlah santri perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan pada lembaga dayah—banyak melahirkan Teungku Inong (ulama perempuan) yang dapat mendirikan dan berpartisipasi dalam pendidikan di dayah, walaupun jumlahnya belum berbanding sama Teungku (ulama laki-laki) dalam peran dan tanggungjawabnya.<sup>36</sup> Nirzalin memandang keberadaan Teungku dayah dengan otoritas yang dimilikinya menjadi hal yang urgen dalam pengembangan sosial keagamaan di Aceh.<sup>37</sup> Bahkan tak jarang otoritas sosial keagamaan menjadi pemahaman tunggal yang diyakini masyarakat Aceh. Namun sejak akhir Orde Baru dan pascaorde Baru, kharismatik Teungku dayah mengalami krisis di tengah masyarakat, seiring dengan hancurnya politik Orde Baru di Indonesia.<sup>38</sup> Namun, masih menurut Nirzalin, seiring perkembangan sosial, politik dan keagamaan yang berkembang di Aceh, karisma otoritas Teungku dayah kembali diperbaiki melalui jaringan ideologi keilmuan yang terus menerus berlangsung di berbagai dayah di Aceh. Tidak hanya itu, modal politik Teungku dayah juga menjadi daya tawar dalam kembalinya karisma otoritas sosial keagamaan.<sup>39</sup> Walaupun kemudian ruang kontestasi otoritas sosial keagamaan di Aceh semakin terbuka di ruang publik.

---

<sup>35</sup> Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, 'Educational Practice: Lessons to Be Learned from Madrasah and Religious Schools in Contemporary Southeast Asia', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5.1 (2015), 29–48.

<sup>36</sup> Eka Srimulyani, 'Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh', *Islam and the Limits of the State*, 2016, 141–65.

<sup>37</sup> Nirzalin Nirzalin, 'Konsep dan Hirarkhi Teungku di Aceh', *Jurnal PASAI*, 7.1 (2013), 172–92.

<sup>38</sup> Nirzalin Nirzalin, *Ulama dan Politik di Aceh 'Menelaah Hubungan Kekuasaan Tengku Dayah dan Negara'*, I (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2012).

<sup>39</sup> Nirzalin Nirzalin, 'Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku Dayah di Aceh', *SUBSTANTIA*, 20.2 (2018), 185–95.

## 2. Perkembangan Salafi-Wahabi

Keterbukaan ruang publik pascareformasi merupakan celah di mana kelompok gerakan transnasional menghidupkan kembali embrio yang pernah ada di Aceh, jika tidak dikatakan identik sama seperti Muhammadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Gerakan transnasional Salafi-Wahabi ini tidak bergerak sendiri namun terkoordinir dengan rapi dengan tujuan memurnikan ajaran Islam. Hal ini menjadi kebijakan politik luar negeri Arab Saudi dalam pengembangan Salafi-Wahabi di dunia, salah satunya adalah Indonesia.<sup>40</sup> Bahkan menurut Noorhaidi Hasan, perkembangan Salafi di Indonesia telah mampu melampaui batas-batas budaya dan politik di Indonesia—di samping mendapat dukungan finansial yang melimpah dari kerajaan Saudi Arabia.<sup>41</sup> Tidak terkecuali di Aceh, kajian dan publikasi penelitian terhadap kelompok transnasional Salafi-Wahabi yang berkembang di Aceh, cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan kajian terhadap kelompok tradisional dayah. Banyak anggapan yang berkembang di Aceh hingga saat ini, Muhammadiyah adalah Salafi-Wahabi pertama yang ada di Aceh setelah gagasan modern Islam Aceh yang dibawa oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Kajian ini ditulis oleh Fauzi, di mana Muhammadiyah secara nasional menegosiasikan salafisme dan modernisme dalam Islam, sedangkan di Aceh Muhammadiyah menerapkan *tajdidnya* dengan tetap membangun progresivitas Islam dan menghormati nilai-nilai tradisional masyarakat Aceh dalam *qanun* di sana.<sup>42</sup> Namun pandangan terhadap Salafi-Wahabi menjadi momok menakutkan dalam masyarakat Aceh, ini terbukti dari berbagai aksi dalam hal

---

<sup>40</sup> Hasbi Aswar, 'Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia', *The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1.1 (2016), 15–30.

<sup>41</sup> Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, militansi, dan pencarian identitas di Indonesia pasca-Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2008).

<sup>42</sup> Niki Alma Febriana Fauzi, 'The Tajdid Movement of Muhammadiyah in Aceh "Negotiating Identity Between Salafism and Modernism"', *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 13.2 (2016), 155–70.

ini adalah perebutan Masjid yang dianggap dikelola oleh aliran Islam pendatang.<sup>43</sup> Karena pada sisi yang lain, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) memandang kelompok transnasional Salafi-Wahabi adalah kelompok keagamaan yang tidak berpegang teguh pada salah satu mazhab *talfiq* (mencampuradukkan mazhab), dan selalu menggunakan terminologi membid'ah-bid'ahkan kelompok lainnya dan tidak sesuai dengan ajaran *Ahl Sunnah wa al-Jamā'ah*.<sup>44</sup> Sehingga di dayah sendiri dalam pengajian yang dilakukan pada santri mengembangkan bahasan tentang kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh kelompok transnasional tersebut, termasuk organisasi Muhammadiyah.<sup>45</sup> Namun menurut Idris dan Sahlan, banyak dari Teungku-teungku di dayah cenderung melakukan simplifikasi terhadap Salafi-Wahabi, karena pengetahuan dan interaksi dengan kelompok ini sangat terbatas dan dihindari,<sup>46</sup> walaupun keberadaan kelompok Salafi-Wahabi saat ini di Aceh terus mengalami perkembangan, hal ini dibuktikan dengan hadirnya berbagai lembaga pendidikan dari afiliasi kelompok ini. Rasid Ritonga turut menelaah perkembangan Salafi ini melalui lembaga pendidikannya di Aceh Tamiang, Pesantren Al-Hidayah merupakan lembaga pendidikan yang digagas di ujung Timur Aceh ini. Selain pengajarnya adalah orang-orang “sunnah” dan sepemahaman dalam memahami *aqidah islamiyah*, dan kurikulum yang disajikan memiliki kecenderungan pada

---

<sup>43</sup> Marzuki Abubakar, 'Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal di Aceh terhadap Aliran Islam Pendatang', *PENAMAS*, 29.3 (2016), 359–72.

<sup>44</sup> Khairil Miswar, 'Wahabi Dalam Perspektif HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) & Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh' (UIN Ar-Raniry, 2019).

<sup>45</sup> Ernita Dewi and Eka Januar, 'A Comprehension Transfer of Wahabiyah in Pengajian System in Dayah Tradisional Aceh', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4.1 (2019), 35–52.

<sup>46</sup> Mulyana Idris and Muhammad Sahlan, 'Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut terhadap Wahabi', *SUBSTANTIA*, 20.1 (2018), 80–89.

pemahaman bahasa Arab dan kajian Islam “sunnah”, tentunya hal ini bertujuan untuk gerakan pemurnian dan “sunnah”.<sup>47</sup>

### 3. Kontestasi Otoritas Keagamaan di Aceh

Baik kelompok transnasional Salafi-Wahabi maupun kelompok dayah memiliki kadar otoritas sosial keagamaannya masing-masing. Hal itu pula yang nantinya menjadikan kontestasi tersebut berlangsung. Sebelum kajian kontestasi otoritas sosial keagamaan Salafi-Wahabi yang akan menjadi kajian penelitian penulis, telah banyak kajian tentang kontestasi sosial keagamaan berlangsung di Aceh, terlebih lagi kajian Aceh pascakonflik dan tsunami tahun 2004 telah menjadi bahan kajian dan terbuka ke seantero dunia. David Kloos mencatat bagaimana otoritas para ulama digunakan untuk melawan penjajah Belanda dengan imajinasi *syahid* dan keimanan yang membuat penjajah kalang-kabut.<sup>48</sup> Namun otoritas itu berubah dalam bentuk yang berbeda pasca penerapan syariat Islam di Aceh. Otoritas sosial keagamaan dengan pelaksanaan syariat terbangun secara masif, semua orang memiliki otoritas menghakimi para pelanggar syariat.<sup>49</sup>

Sedikit berbeda dengan Robert Michael Feener, konstruksi otoritas sosial keagamaan di Aceh mengalami perubahan hingga

---

<sup>47</sup> Mhd Rasid Ritonga, Reproduksi Salafi di Negeri Syariah: Studi Kasus Pesantren Al-Hidayah Aceh Tamiang, dalam *Memuliakan Keragaman 'Pembentukan Kesalehan Artikulasi Islam Aceh'*, ed. by Noviandy Noviandy and Muhammad Alkaf, 1, 1st edn (Langsa: ZAWIYAH Serambi Ilmu Pengetahuan).

<sup>48</sup> David Kloos [a], 'A Crazy State: Violence, Psychiatry, and Colonialism in Aceh, Indonesia, ca. 1910-1942', *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, A Crazy State, Vol. 170, No. 1, 2014 (2014), 25–65 (pp. 40–42).

<sup>49</sup> David Kloos [b], 'In The Name Of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia', *Cornell University Press*, Number 98, October 2014 (2014), 59–90; Lihat juga: David Kloos [a], 'A Crazy State: Violence, Psychiatry, and Colonialism in Aceh, Indonesia, ca. 1910-1942', *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, A Crazy State, Vol. 170, No. 1, 2014 (2014), 25–65; David Kloos, *Becoming Better Muslims: Religious Authority and Ethical Improvement in Aceh, Indonesia* (the United Kingdom: Princeton University Press, 2018); David Kloos Mirjam Künkler, 'Studying Female Islamic Authority: From Top Down to Bottom-Up Modes of Certification', *Asian Studies Review*, Vol. 40, No. 4, 2016 (2016), 479–490.

saat ini. Perubahan otoritas tersebut tidak lagi terpusat pada ulama, namun lebih didominasi oleh para cendekiawan dan akademisi. Hal ini terlihat pada struktur pemerintahan; guru, hakim, jaksa, majelis ulama, dan berbagai lembaga profesional dan pendidikan. Termasuk di dalamnya para alumni dayah yang telah menempuh pendidikan formal.<sup>50</sup> Sedangkan Ichwan menelaah perbedaan otoritas ulama pada MPU Aceh yang menghadapi resistensi dan kerap tidak dijadikan rujukan oleh Gubernur Pemerintah Aceh Irwandi-Nazar. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang terjadi, baik itu ketika di keluarkannya Peraturan Gubernur No. 25. Tahun 2007 hingga penolakan pengesahan *Qanun Jinayat Aceh*—mengesahkan otoritas ulama dalam hal ini adalah MPU sangat lemah.<sup>51</sup> Dalam kajian yang lain, Ichwan melihat keberadaan MPU memiliki kekuatan penuh *power full* dalam menyatakan otoritas mana yang berhak ada dan berkembang di Aceh. Namun dalam kajiannya tentang Neosufisme dan Gerakan Tauhid Tasawuf di Aceh hal ini menjadi berbeda. Pengecualian ini tidak terlepas dari 4 hal yang melatarbelakanginya; keturunan, dukungan para ulama, keilmuan yang mampu mengintegrasikan antara syariah dan tasawuf, dan terakhir dukungan politik dan massa<sup>52</sup>

Dalam kajian otoritas sosial keagamaan pada perempuan di Aceh yang dapat memimpin lembaga pendidikan keagamaan dan berkontribusi dalam ruang publik, tidak lain mereka yang mengkombinasikan ijazah mereka. Ijazah dari lembaga pendidikan

---

<sup>50</sup> R. Michael Feener, 'Muslim Religious Authority in Modern Asia: Established Patterns and Evolving Profiles', *Asian Journal of Social Science*, 42.5 (2014), 501–16 (p. 512).

<sup>51</sup> Moch Nur Ichwan, 'Official Ulema And The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh', *Journal of Islamic Studies*, 22.2 (2011), 183–214 (pp. 205–10).

<sup>52</sup> Moch Nur Ichwan, 'Neo-Sufism, Shariatism, and Ulama Politics: Abuya Shaykh Amran Waly and the Tauhid-Tasawuf Movement in Aceh', in *Islam, Politics and Change: The Indonesian Experience after the Fall of Suharto*, ed. by Kees van Dijk and Nico J.G. Kaptein (Leiden: Leiden University Press (LUP), 2016) <<https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/38574>> [accessed 23 January 2020].

dayah dan dari lembaga pendidikan formal. Menurut Mariam Kunker dan David Kloos, hal ini yang menjadikan perempuan memiliki otoritas sosial keagamaan yang sama dengan laki-laki di samping dukungan adat dan konstruksi kesetaraan gender yang berkembang.<sup>53</sup> Dalam penelitian yang lain, Kloos menuliskan kisah dua perempuan Aceh; Umi Rahimun dan Umi Hanisah. Kedua perempuan juga memiliki kolaborasi dua ijazah—kolaborasi dua ijazah ini pula yang menjadikan keduanya dapat mengkonstruksi otoritasnya dalam ruang sosial keagamaan dan membela kaumnya.<sup>54</sup>

Berangkat dari berbagai kajian di atas, khususnya dalam topik kajian kontestasi otoritas sosial keagamaan, peneliti akan menengahkan kajian yang berbeda dengan kajian sebelumnya. Tulisan ini akan menelaah pada pertarungan dan perebutan otoritas sosial-keagamaan yang telah terjadi antara kelompok tradisional yang diwakili oleh kelompok dayah dengan kelompok transnasional Salafi-Wahabi di Aceh. Kelompok transnasional ini banyak terindikasi dari para alumni non-dayah, alumni Timur Tengah, dan alumni dayah sendiri yang telah mengecap pendidikan formal dan luar negeri.

Aceh tempo dulu tentunya berbeda dengan Aceh saat ini, terlebih lagi Aceh pascakonflik dan tsunami tahun 2004.<sup>55</sup> Pelaksanaan syariat Islam pun memasuki babak baru yang merupakan bagian dari buah perdamaian yang tertuang dalam MoU Helsinki. Kontestasi perebutan otoritas sosial keagamaan pun tidak bisa dihindari dalam fenomena Aceh baru dewasa ini. Islam kultural yang merupakan akar sejarah di Aceh pun mengalami resiliensi dengan berbagai konstruksi pemahaman Islam baru yang mulai satu dekade terakhir ini berpenetrasi kuat di sini. Tentunya kehadiran konstruksi paradigma Islam baru di Aceh bukan tanpa alasan—bahkan kelompok ini mengklaim memiliki akar sejarah

---

<sup>53</sup> Mirjam Künkler, p. 482.

<sup>54</sup> David Kloos, 'The Saliency of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia', *Asian Studies Review*, VOL. 40, NO. 4 (2016), 527–544.

<sup>55</sup> Feener, *Shari'a and Social Engineering...*, 201.

tersendiri. Lebih dari pada itu, persetujuan tidak hanya pada level wacana, namun juga pada perebutan massa yang tak jarang berakhir dengan bentrokan dalam mempertahankan pemahaman.

#### 4. Ruang Publik Aceh

Ruang publik menurut Habermas tidak dapat dijadikan arena eksklusif aliran atau kelompok tertentu. Sesuai definisinya, *ruang publik tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para warga negara dapat berlangsung*<sup>56</sup>. Warga negara yang dimaksudkan di sini tentu saja juga mencakup warga agama. Warga agama juga berhak menyatakan opini mereka di ruang publik, karena gagasan warga agama dapat didiskusikan secara rasional sebagai yang berpotensi memiliki isi kognitif. Tradisi agama memiliki kekuatan spesial untuk mengartikulasikan isi moralitasnya.

Feener memandang ruang publik Islam di Aceh terfokus pada syariat Islam—pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak terlepas pada hubungan antara keagamaan dan kepemimpinan politik di sana. Kedua hal inilah yang membentuk ruang publik Islam di Aceh.<sup>57</sup> Tidak berbeda dengan Kingsbury, ruang publik di Aceh ketika konflik, GAM sendiri tidak bisa keluar dari narasi Islam sebagai ruang publik—terbukti seluruh anggota GAM berpaham Sunni dan siap menegakkan syariat Islam.<sup>58</sup> Karena keberadaan ulama yang memiliki basis dayah di seluruh Aceh telah

---

<sup>56</sup> Francisco Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 134.

<sup>57</sup> R. Michael Feener, 'Introduction; Islamic Law in Indonesia: Formation of a Modern Tradition', in *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions* (Cambridge: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2007), 223..

<sup>58</sup> Damien Kingsbury, 'The Free Aceh Movement: Islam and Democratisation', *Journal of Contemporary Asia*, 37.2 (2007), 166–89 (p. 172).

menanamkan ruang publik ini jauh hari sebelum konflik Aceh berlangsung.<sup>59</sup>

Walaupun kemudian ruang publik Islam yang selama ini diisi oleh dayah, turut diwarnai dengan terbentuknya madrasah sejak awal abad 20. Madrasah menawarkan pendidikan yang lebih modern dengan mengkolaborasikan nilai-nilai religiusitas dan sekular.<sup>60</sup> Kehadiran madrasah ini juga didukung oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), dengan harapan dapat lebih mengembangkan metode berfikir umat Islam di Aceh.<sup>61</sup>

Namun pada masa konflik berlangsung ruang publik Islam cenderung dialamatkan keberadaan perempuan. Selain perempuan menjadi korban konflik, baik itu dampak konflik oleh GAM, korban kekerasan seksual oleh militer, juga menjadi korban penindasan agama yang dilakukan oleh ulama.<sup>62</sup> Padahal pada era orde baru eksistensi ruang publik Islam belum begitu berkembang luas. Orde reformasi membuka tabir dan eksistensi ruang publik kepada pemerintah, tidak terkecuali Aceh yang menjadikan momen tersebut dengan menerapkan syariat Islam.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Michael Feener, *Sharia and Its Limits*, dalam R. Michael Feener, 'State Shari'a and Its Limits', *Islam and the Limits of the State*, 2016, 1–23 (p. 4).

<sup>60</sup> Marzuki Marzuki, 'Diniyah in Public Schools: A Model of Islamic Curriculum Implementation in Multi Religious Society in Banda Aceh Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4.1 (2016), 15 (p. 17).

<sup>61</sup> Feener, *Shari'a and Social Engineering...*, 66–69.

<sup>62</sup> Noerdin memandang ruang publik di Aceh tidak menguntungkan keberadaan perempuan. Suasana konflik, perempuanlah yang sangat berdampak konflik yang diakibatkan oleh GAM, bahkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh militer, bahkan menjadi korban politik ruang publik Islam ketika syariat Islam mulai diserukan ke publik dan dilegitimasi oleh Ulama. Edriana Noerdin, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: Women Research Institute, 2005), 3–4.

<sup>63</sup> Azyumardi Azra, 'Political Islam in Post-Soeharto Indonesia', in *Islamic Perspectives on the New Millennium*, ed. by Amin Saikal and Virginia Hooker (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2004), 133–49 (p. 138) <<https://www.cambridge.org/core/books/islamic-perspectives-on-the-new-millennium/political-islam-in-postsoeharto-indonesia/CCED8F91908905DA1FF0515308EE4D78>> [accessed 4 September 2020]; M. Zainal Anwar, 'Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik Dalam Kebijakan Publik', *Millah*, 10.2 (2011), 191–212 (p. 194).



Pascagempa dan tsunami melanda, Aceh mengalami perubahan yang sangat luar biasa, tidak hanya politik, sosial, budaya hingga pemikiran keagamaan pun turut terjadi.<sup>64</sup> Pada saat itu juga dikabarkan terjadinya upaya kristenisasi besar-besaran yang diakibatkan oleh kemiskinan dan merebaknya pengangguran. Tidak hanya itu, pascatsunami juga terjadi peningkatan interaksi dengan lawan jenis, pelaku khalwat dan zina terus bertambah. Ini tidak lain terjadi karena keterbukaan Aceh pascakonflik dan tsunami menjadikan Aceh sebagai pusat interaksi para pencari kerja, dan masuknya budaya Barat dan globalisasi.<sup>65</sup> Hal ini disadari oleh pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Illiza Sa'aduddin Jamal, usaha untuk mengampanyekan syariat Islam mulai terus dilakukan.<sup>66</sup> Walaupun dalam ruang publik terjadi kritik dalam menggunakan term 'syariat Islam' karena term ini dipahami dan dilaksanakan secara parsial, syariat Islam harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan term 'Syariat Islam Kaffah'. Ini juga merupakan bentuk kritik dari para ulama yang diwakili oleh Waled Nu (Nur Zahri) Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) kepada pemerintah yang melaksanakan syariat Islam dengan tidak sempurna. Masih menurut Idria, padahal pihak GAM sendiri serta para intelektual Aceh memahami implementasi syariat Islam yang diberikan pemerintah pusat hanyalah sebatas alat politik.<sup>67</sup> Karena Hasan Tiro tidak menyatakan secara khusus Aceh harus dijadikan daerah

---

<sup>64</sup> Moch Nur Ichwan, 'Alternative to Shariatism: Progressive Muslim Intellectuals, Feminist, Queers and Sufis in Contemporary Aceh', in *Regime Change, Democracy And Islam The Case Of Indonesia* (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), 354 (p. 137) <<https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/jeugdrecht/irpfinal20132.pdf>>.

<sup>65</sup> David Kloos, 'Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs, and The Dynamics of Vigilante Violence in Aceh', in *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia* (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), 354 (p. 217).

<sup>66</sup> Kloos, 'Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs...', 223.

<sup>67</sup> Reza Idria, 'Cultural Resistance to Shariat Islam in Aceh', in *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia* (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), 354 (186–87).

bersyariat—melainkan masyarakat Aceh harus memiliki jiwa nasionalisme.<sup>68</sup>

Terbentuk perebutan ruang publik dalam gerakan Islam pun terjadi, bahkan menurut Ansor kontestasi di ruang publik Islam yang berlangsung tidak hanya antara Islam dan sekular saja. Melainkan terjadi kontestasi antara sesama eksponen gerakan yang menggunakan Islam sebagai legitimasi gerakan.<sup>69</sup> Tidak terkecuali perbuatan ruang publik yang saat ini sedang berlangsung di Aceh antara dayah dan Salafi-Wahabi.

### **E. Kerangka Teoritis**

Diskursus otoritas sosial keagamaan dalam berbagai kajian ilmiah tidak terlepas dari berbagai analisa dilatarbelakangi oleh kajian-kajian teoritis. Penggunaan berbagai kajian teoritis oleh para peneliti dalam menganalisa berbagai fenomena otoritas sosial keagamaan yang berlangsung tentunya bukan tanpa alasan. Sebuah fenomena penggunaan otoritas yang terjadi merupakan penampakan yang terdapat di baliknya, bisa saja hal itu dikonstruksikan oleh aktor, ajaran, sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, objektivitas peneliti akan diuji dalam menentukan dan menggunakan teori yang digunakan.

Sebelum lebih jauh, penulis merasa penting untuk menjelaskan bahwasanya penulisan disertasi menelaah tentang Kontestasi Otoritas Keagamaan yang terjadi antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi. Konteks ulama dayah dalam penelitian ini merupakan kelompok tradisional Islam yang telah berkembang lama dari masa ke masa di Aceh. Sedangkan Salafi-wahabi merupakan kelompok gerakan transnasional Islam yang mulai berkembang di dunia, dalam berbagai kajian ilmiah dunia kelompok salafi-wahabi

---

<sup>68</sup> Ahmad, 'The Application of Islamic Law in Indonesia; The Case Study of Aceh', 155.

<sup>69</sup> Muhammad Ansor, 'Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public Sphere in Post-Reform Indonesia', *Studia Islamika*, 23.3 (2016), 471–515 (p. 472).

ini dikenal dengan gerakan salafisme.<sup>70</sup> Penulis menggunakan frasa salafi-wahabi dalam disertasi ini merujuk pada konsep emik dan etik dalam penelitian lapangan. Secara emik kajian ilmiah yang telah dilakukan di berbagai belahan dunia; Maroko,<sup>71</sup> Mesir,<sup>72</sup> Tunisia, Bosnia, Pakistan dan Indonesia,<sup>73</sup> Ghana,<sup>74</sup> Syiria,<sup>75</sup> Saudi,<sup>76</sup> Malaysia,<sup>77</sup> Belanda,<sup>78</sup> dan berbagai kajian lainnya menggunakan frasa Salafi. Secara etik penulis menggunakan frasa wahabi, frasa ini adalah frasa yang dikenal luas di Aceh yang menunjukkan kelompok salafi. Bagi masyarakat, frasa salafi dapat digunakan untuk menjelaskan keberadaan komunitas ulama dayah yang tersebar di Aceh. Oleh karena itu penulis menggabungkan dua frasa salafi-wahabi, baik secara etik yang berkembang di Aceh, maupun secara emik dalam kajian ilmiah.

Dalam melihat dan menelaah fenomena ini di Aceh, peneliti menggunakan tiga kajian teoritis dalam penelitian ini.

---

<sup>70</sup> Mohamed Bin Ali and Muhammad Saiful Alam Shah Bin Sudiman, "Salafis and Wahhabis: Two Sides of the Same Coin?," *Www.Rsis.Edu.Sg*, last modified Oktober 2016, accessed December 5, 2021, <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co16254-salafis-and-wahhabis-two-sides-of-the-same-coin/#.YaxZY9JBzIW>.

<sup>71</sup> Lahouari Addi, 'Islam Re-Observed: Sanctity, Salafism, and Islamism', *The Journal of North African Studies*, 14.3–4 (2009), 331–45.

<sup>72</sup> J. Hoigilt and F. Nome, 'Egyptian Salafism in Revolution', *Journal of Islamic Studies*, 25.1 (2014), 33–54.

<sup>73</sup> William Racimora, European Parliament, and Directorate-General for External Policies of the Union, *Salafist/Wahhabite Financial Support to Educational, Social and Religious Institutions: Study* (Luxembourg: EUR-OP, 2013) <<http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:BB3113945:EN>> [accessed 17 November 2021].

<sup>74</sup> Ousman Murzik Kobo, 'Shifting Trajectories of Salafi/Ahl-Sunna Reformism in Ghana', *Islamic Africa*, 6.1–2 (2015), 60–81.

<sup>75</sup> Farah El-Sharif, 'The Rhetoric of Twentieth-Century Damascene Anti-Salafism', *Contemporary Levant*, 5.2 (2020), 113–25.

<sup>76</sup> David Commins, 'Saudi Arabia in Transition: Insights on Social, Political, Economic and Religious Change', in *From Wahhabi to Salafi*, ed. by B Haykel, T Hegghammer, and S Lacroix (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 151–66; David Dean Commins, *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*, 2006.

<sup>77</sup> Mohd Rizal Yaakop and Asmady Idris, 'Wahabi Doctrine in Malaysia-Saudi Relations', *SSRN Electronic Journal*, 2010.

<sup>78</sup> Martijn de Koning, 'The Moral Maze: Dutch Salafis and the Construction of a Moral Community of the Faithful', *Contemporary Islam*, 7.1 (2013), 71–83.

Memperbincangkan kontestasi otoritas tidak terlepas dari bangunan otoritas itu sendiri dan hal-hal yang menopang keberadaan otoritas tersebut.<sup>79</sup> Secara lebih detil proyek penelitian disertai mengambil 3 (tiga) lokus penelitian; pertama, ruang publik keagamaan yang memperebutkan sarana dan fasilitas ibadah. Kedua, kebijakan publik, dimana kedua kelompok yang berseteru mencoba mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Lokus penelitian dalam pembahasan ini berada pada kajian kebijakan pemerintahan. Sedangkan ketiga, perebutan massa dalam merebut atau meneguhkan otoritas keagamaan masing-masing pihak yang berkontestasi. Kajian dalam lokus penelitian ketiga ini cenderung menelaah peran agensi dan massa dalam menyahuti kebutuhan sosial keagamaan dan arah politik lokal. Berangkat hal di atas pengkajian dalam disertasi ini akan menggunakan teori *Religious Authority* yang digagas oleh Max Weber dan Kuasa Wacana Kuasa/Pengetahuan yang dicetuskan oleh Michael Foucault, dan Habitus yang digagas oleh Piere Bourdieu. Ketiga teori tersebut dapat peneliti jelaskan sebagai berikut:

### **1. Konstruksi Otoritas Sosial Keagamaan Masyarakat Aceh**

Tidak mudah untuk dapat melihat bagaimana konstruksi sosial keagamaan yang terbangun atau dibangun oleh para pemegang otoritas yang telah terpolarisasikan. Konstruksi otoritas tersebut tidak dibangun dalam waktu yang cepat sehingga terbangunnya loyalitas, nilai sosial, spritual maupun *ashabiyah*. Dalam pembahasan ini peneliti akan meminjam kajian teoritis yang telah dikembangkan oleh Piere Bourdieu, dengan teori Habitus, Modal ditambah Arena yang kemudian menghasilkan Prilaku (Habitus x Modal + Arena = Perilaku). Karena setiap kelompok memiliki latar belakang, kebiasaan dan penggunaan-penggunaan otoritas dengan bentuk dan gaya yang berbeda-beda.

---

<sup>79</sup> Durkheim memandang agama adalah konstruksi yang dibangun oleh manusia itu sendiri melalui berbagai unsur kebutuhannya, karena itu otoritas tidak berdiri dengan sendirinya, Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion* (Oxford University Press, 1996), 134.

Habitus umpamanya, habitus merupakan struktur mental atau kognitif, hal ini akan menghubungkan setiap anggota kelompok yang terpolarisasi tersebut dengan relasi sosialnya. Struktur-struktur tersebut terbangun dari berbagai proses logika, mental dan dari lingkungan sekitarnya yang menginternalisasikan hal-hal tersebut pada dirinya. Hal ini kemudian membentuk seseorang untuk dapat merasakan, mengerti, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial mereka. Habitus dapat menjadi sistem kecenderungan yang *embodied*, berpindah-pindah sesuai dengan pengalaman masa lalu seseorang—berfungsi sebagai sumber persepsi, aksi, dan memungkinkan pencapaian yang tak terbatas dan berubah-ubah.<sup>80</sup> Habitus setiap agen atau kelompok tentunya memiliki perbedaan yang disebabkan oleh berbagai hal yang melatarbelakangi dan mengitarinya.

Sedangkan *arena* adalah bagian dari kajian penting dalam melihat agen dan struktur yang terbangun dalam ruang kontestasi. Secara lebih simpel arena akan memperlihatkan bagaimana hubungan yang dibangun agen-individu maupun lembaga pendidikan dalam berinteraksi. Seorang individu atau lembaga dalam berhubungan dan berinteraksi dengan masyarakat, tidak terlepas dari arena semi otonom yang dimilikinya, seperti keagamaan, ekonomi, kesenian dan budaya. Arena-arena semi otonom ini memiliki konstruksi logikanya tersendiri yang berusaha membangkitkan semangat atau keyakinan para agennya yang sangat berhubungan dengan arena di mana mereka berada. Arena dalam pandangan Bourdieu adalah ruang di mana pertarungan dan kompetisi ini berlangsung, ruang ini melibatkan berbagai jenis modal-modal kapital seperti, modal ekonomi, modal kultural (pengetahuan), modal sosial (relasi individual) dan modal simbolik (kehormatan).<sup>81</sup> Seorang agen atau lembaga dalam arena akan

---

<sup>80</sup> Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, trans. by Richard Nice, XXVIII (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 72 <<https://book.cc/2363468/a8ca17?dsource=recommend>> [accessed 1 February 2020].

<sup>81</sup> Pierre Bourdieu, *Arena Produksi Kultural 'Sebuah Pengkajian Sosiologi Budaya'*, trans. by Yudi Santosa, II (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 72.

sangat ditentukan oleh modal yang dimilikinya. Kedua kelompok yang telah terpolarisasi dalam penelitian tentunya memiliki berbagai modal, baik yang telah melekat pada mereka—maupun modal yang sedang diproduksi untuk mencapai berbagai cita-cita kelompoknya.

Terakhir adalah *distinction* merupakan salah satu konsep yang dikaji oleh Bourdieu, *distinction* secara bahasa dipahami sebagai pembeda. *Distinction* dalam makna sosiologis yang digagas Bourdieu tidak hanya dalam pengertian sebagai pembeda, namun juga masuk dalam pemahaman yang lain, seperti perlawanan, pengakuan, atau menunjukkan posisi dan lain sebagainya. *Distinction* tidak dapat dilakukan atau terjadi begitu saja, *distinction* itu dapat dibangun sebagaimana habitus dan arena yang diciptakan dengan berbagai modal yang dimiliki setiap kelompok.<sup>82</sup> *Distinction* dengan berbagai prinsip dan modal yang dimiliki setiap individu atau kelompok dapat menjadi karakter dan dipaksakan pada habitus yang lebih luas. Hal ini sebenarnya yang kemudian menjadi fenomena pada akar rumput, hal membedakan menjadi kekuatan sekaligus respons terhadap intoleransi yang terjadi di Aceh saat ini.

## 2. Wacana/Kuasa dalam Poliarisasi Gerakan Keagamaan

Sebuah wacana pengetahuan yang dikembangkan oleh siapa pun atau kelompok apa pun, ia tidak terbangun dengan sendirinya. Seorang pemegang otoritas akan menggunakan otoritas yang dimilikinya untuk mengkonstruksikan wacana pengetahuan yang diyakininya. Dalam melihat konstruksi wacana/pengetahuan ini, peneliti akan meminjam kajian teoritis yang dikembangkan Michael Foucault tentang wacana kuasa/pengetahuan yang tidak terlepas dengan pemegang otoritas dalam tiga bentuk otoritas yang digagas oleh Max Weber yang ada pada kajian teori selanjutnya. Pemegang otoritas dari setiap kelompok yang terpolarisasikan akan

---

<sup>82</sup> Pierre Bourdieu, *Distinction A Social Critique of the Judgement of Taste*, trans. by Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 243.

mengkonstruksikan otoritasnya melalui wacana-wacana, tidak lain adalah untuk mempertahankan keberadaan otoritas yang dimilikinya. Foucault memandang bahwasanya pengetahuan merupakan cara seseorang memaksakan sesuatu pada orang lain, tanpa memberi kesan berasal dari pihak tertentu. Modal simbolik atau modal kultural yang dimiliki pemegang otoritas akan semakin menguat ketika kriteria ilmiah dalam sebuah wacana dapat dibangun dalam konstruksi pengetahuan yang diberikan.<sup>83</sup>

Dalam pandangan Foucault kekuasaan bukanlah milik subyek tertentu melainkan ada dalam diri setiap orang sebagai strategi, sehingga akhirnya kekuasaan itu ada di mana-mana. Konsep kekuasaan yang tersebar menjadi sebagai strategi yang dapat dijalankan oleh setiap orang dari dalam dirinya sendiri sejak ia memiliki kehendak untuk mengetahui. Kekuasaan akan bekerja menurut kuatnya perbedaan-perbedaan yang ada. Kekuasaan menjadi ada karena banyaknya perbedaan. Dalam banyak perbedaan dapat dibangun relasi atau jaringan sehingga melalui jaringan itu kekuasaan muncul. Dan karena perbedaan-perbedaan ini, maka kekuasaan dapat beroperasi melalui Normalisasi (Menjaga) dan Regulasi (Melarang-Menghukum). Menjaga dan Menghukum, tidak ditempuh sebagai cara-cara untuk menindas apalagi hal-hal kekerasan, tetapi sebagai tindakan pendisiplinan untuk mencegah pihak-pihak lain ketika ada praktik dominasi terhadap pihak lain pula.<sup>84</sup>

Oleh karena itu, penulis memandang bahwasanya otoritas menjadi unsur yang sangat penting di bawah klaim-klaim ilmiah yang dikonstruksikan. Konon lagi halnya wacana kebenaran ilmiah yang ditawarkan didesain dalam ruang metafisik—meningkatkan kredibilitas sebuah otoritas dan penerimaan wacana pada ruang publik. Kebenaran metafisik diyakini sebagai bentuk peneguhan dari berbagai jenis kebenaran menuju pengetahuan agama dalam

---

<sup>83</sup> Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat Akar Kekerasan dan Dominasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 13.

<sup>84</sup> Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: KANISIUS, 2016), 12–14.

ruang empiris.<sup>85</sup> Kontestasi otoritas yang terjadi di Aceh tidak terlepas dari pemegang otoritas dan wacana pengetahuan yang berkembang di sana. Pemegang otoritas dapat mereduksi, mengeliminasi, menolak terhadap wacana yang berkembang dengan wacana yang ia kembangkan.

### 3. Tipologi Otoritas Keagamaan di Aceh

Untuk melihat tipologi otoritas keagamaan yang menjadi pegangan para pemilik otoritas di Aceh, peneliti meminjam konsep otoritas keagamaan yang dikembangkan oleh Max Weber. Ada tiga bentuk konstruksi otoritas yang ditemukan dari teori Weber; otoritas kharisma, otoritas tradisional, dan otoritas legal formal.<sup>86</sup> Ketiga bentuk otoritas ini menurut Weber tidak terkonstruksi dengan sendirinya serta memiliki bentuk dan sifatnya masing-masing. Baik kelompok tradisional dayah maupun kelompok transnasional Salafi-Wahabi akan menjadikan bentuk-bentuk otoritas dalam menancapkan pengaruh untuk mendapatkan loyalitas dari para jamaahnya. Otoritas yang terbangun dengan kharisma umpamanya, karisma menurut Weber merupakan anugerah yang tidak

---

<sup>85</sup> Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002), 146–48; Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, 29–31. Dalam buku *The History of Sexuality Vol. I*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan: 1) Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. 2) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. 3) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. 4) Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. 5) Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya. 2. Pengetahuan sebagai bentuk Kekuasaan, dalam Umar Kamahi, 'Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik', *Jurnal Al-Khitabah*, 3.3 (2017), 120 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>> [accessed 9 February 2020].

<sup>86</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press, 1978), 268.



didapatkan oleh setiap individu, karena otoritas ini memiliki klaim berasal dari pemilik otoritas yang sesungguhnya. Pemilik otoritas yang sesungguhnya adalah Sang Pencipta yang diwakilkan kepada Nabi,<sup>87</sup> atau para wali. Otoritas karisma ini dapat melakukan klaim dan menerobos berbagai struktur normatif, karena memiliki endapan norma yang penuh karisma seperti layaknya diungkapkan oleh seorang Nabi.

Sedangkan bentuk otoritas yang kedua yaitu otoritas tradisional. Otoritas ini terdapat dalam kekuatan tradisi-budaya yang bersifat lebih feodalistik. Otoritas terhadap sesuatu itu terwariskan secara turun-temurun, terkesan tidak rasional dan tidak konsisten serta melanggengkan *status quo*. Sebuah kebenaran sangat tergantung pada pemegang otoritas, '*kebenaran hamba sangat tergantung pada kebenaran sang tuan*'. Dalam otoritas tradisional ini Weber membedakannya lagi dalam tiga bentuk; gerontokrasi, patriarkhalisme, dan patrimonialisme.<sup>88</sup> Ketiga, otoritas legal rasional. Otoritas ini dikonstruksi berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah disepakati. Legal rasional dapat dibentuk dan dimodifikasikan sesuai kebutuhan yang berasal dari fakta hingga pembentukan norma-norma hukum.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Martin E. Spencer, 'Weber on Legitimate Norms and Authority', *The British Journal of Sociology*, 21.2 (1970), 123–134 (pp. 124–125).

<sup>88</sup> Gerontokrasi adalah otoritas yang dimiliki oleh seseorang yang lebih tua dalam suatu kelompok dan memiliki otoritas warisan secara turun-temurun. Patrimonialisme merupakan otoritas yang mengharuskan pemegang otoritas bekerja sama dengan para kerabat-kerabatnya yang memiliki loyalitas secara pribadi. Sedangkan patriarkhalisme adalah otoritas yang pegang berdasarkan bias terhadap gender.

<sup>89</sup> Martin E. Spencer, 'Weber on Legitimate Norms and Authority', *The British Journal of Sociology*, 21.2 (1970), 123–134 (pp. 125–126).

Bentuk Otoritas	Sumber	Kepemimpinan	Perubahan
<b>Tradisional</b>	Non-Rasional	Kebiasaan	Statis
<b>Karismatik</b>	Pengaruh (Emosional)	Pribadi/perseorangan	Dinamis
<b>Legal (Rasional)</b>	Rasional	Kekuasaan Impersonal	Dinamis

Tabel 1 Legitimasi Otoritas

## F. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis, tentunya dengan penyesuaian terhadap data yang dibutuhkan dan didapatkan dalam *field research*. Pengumpulan data telah peneliti lakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Data yang terkumpul telah penulis klasifikasikan sesuai konten masalah yang dijawab pada setiap babnya, setelah itu penulis analisis dan refleksikan hingga menghasilkan kesimpulan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan tujuan dapat melihat bangunan dari otoritas sosial keagamaan dari setiap kelompok yang berkontestasi di Aceh. Perspektif dasar sosiologi berkonsentrasi pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk di dalamnya agama. Agama merupakan salah satu bentuk dari bangunan konstruksi sosial; tuhan, ritual, nilai, hirarki keyakinan-keyakinan, dan perilaku religius. Ini merupakan bentuk untuk mendapatkan kekuatan kreatif atau menjadi subjek dari kekuatan lain yang lebih kuat dalam dunia sosial.<sup>90</sup> Pendekatan ini menurut penulis sangat membantu proses dalam melakukan pembacaan terhadap paradigmatik yang dibangun oleh kedua kelompok yang berkontestasi.

---

<sup>90</sup> *Aneka Pendekatan Studi Agama*, ed. by Peter Connolly, trans. by Imam Khoiri, IV (Yogyakarta: LKiS, 2012), 172.

Praktik-praktik keagamaan setiap kelompok yang berkontestasi dapat dikaji bahwasanya memiliki hubungan dengan institusi, struktur, ideologi, kelas dan perbedaan kelompok yang dengannya masyarakat terpolarisasi oleh masing-masing kelompok.<sup>91</sup> Setiap bentuk pembeda dari setiap kelompok akan menjadi bahan analisis tersendiri dalam pendekatan ini. Pendekatan ini juga memungkinkan bagi penulis untuk melihat bagaimana otoritas sosial keagamaan dibangun dalam setiap hubungan yang terjadi di setiap kelompok yang berkontestasi.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kota Banda Aceh, Ibukota provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk 238.814 jiwa dengan kepadatan 3.892/km<sup>2</sup> (10,080/sq mil), yang tersebar pada 10 kecamatan dalam 90 desa/kelurahan. Secara geografis, kota Banda Aceh berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Utara, Samudera Hindia di sebelah Barat, dan kabupaten Aceh Besar di sebelah Timur dan Selatan.<sup>92</sup> Masyarakat kota Banda Aceh terdiri dari komunitas masyarakat yang lebih plural dengan rata-rata tingkat kesibukan layaknya masyarakat kota di Indonesia. Hal inilah yang membedakan kota Banda Aceh berbeda dengan kota-kota lainnya di Aceh.

Banda Aceh merupakan salah satu ruang publik di mana berbagai bentuk kontestasi dan perebutan otoritas sosial keagamaan itu terjadi. Di sana terdapat banyak Masjid yang beragam dalam pelaksanaan ritual ibadahnya. Pada beberapa Masjid terjadi perebutan pengelolaan Masjid dengan pengambilalihan secara sepihak, dan pengusiran jamaah pengajiannya. Walaupun hal ini juga terjadi pada kota-kota yang lain di Aceh, namun masih dalam frekuensi yang lebih sedikit.

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, 174.

<sup>92</sup> *Banda Aceh dalam Angka 'Banda Aceh Municipality in Figures 2019'* (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2019), II <<https://bandaacehkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/731a4401ebf3def4aa5c5414/kota-banda-aceh-dalam-angka-2019.html>> [accessed 11 March 2020].

Keberadaan komunitas masyarakat yang beragam, menurut peneliti menjadikan ruang dimana kontestasi itu dapat berlangsung. Komunitas yang plural di perkotaan ini pula yang memungkinkan gerakan transnasional Salafi-Wahabi dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dengan adanya lembaga pendidikan sekolah atau pesantren sebagai bentuk dari kelangsungan gerakan ini di Aceh, tepatnya di Aceh Besar, sebagai kota penyangga ibukota provinsi ini.

Lokasi utama studi lapangan dalam penelitian ini adalah kota Banda Aceh, namun beberapa kawasan dalam kabupaten penyangga seperti Aceh Besar juga akan menjadi amatan peneliti. Basis kedua kelompok ini tidak hanya berada di kota Banda Aceh, tetapi juga berada di Kabupaten Aceh Besar, jumlah dayah atau pesantren, unit usaha hingga jumlah komunitas berada di sana. Pada tataran ini pula pembentukan otoritas setiap kelompok dikonstruksikan diproduksi dalam ruang-ruang internal setiap kelompok dan kemudian didakwahkan atau tersebar ke ruang publik. Keberadaan kota banda Aceh sebagai ibukota provinsi menjadi penting bagi kedua kelompok ini.

Studi lapangan pada penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan waktu berjalan. Dalam penelitian ini penulis telah ikut serta dalam jamaah di mana pada Masjid tersebut pernah terjadi pengusiran/pembubaran pengajian, Masjid yang disinyalir dikuasai kelompok Salafi-Wahabi dan berkunjung ke lembaga pendidikan pada kedua kelompok yang berseteru. Selanjutnya pengolahan dan analisis dari studi lapangan ini menjadi kajian selanjutnya sesuai dengan sisa waktu periode perkuliahan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

### a) Wawancara

Untuk mendapatkan data yang tepat, penulis melakukan wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam melakukan wawancara penulis menerapkan teknik tidak terstruktur. Untuk memahami bagaimana konstruksi gerakan yang dilakukan oleh kelompok ulama dayah, penulis telah mewawancarai Teungku Yusuf al-Qardhawi al Asyi (Mantan Ketua Ketua FPI Aceh dua periode dan Koordinator Aksi Parade Aswaja tahun 2015). Selanjutnya Teungku Zainuddin Ubit (Ketua FPI Kota Banda Aceh dan Koordinator berbagai aksi di Kota Banda Aceh). Penulis juga mewawancarai para aktivis anti Salafi-Wahabi yang kerap muncul ke berbagai media di Aceh, Teungku Umar Rafsanjani, Lc, MA, Teungku Mustafa Husein Woyla, mereka juga turut terlibat dalam berbagai aksi di kota Banda Aceh. Selain itu, penulis juga telah mewawancarai para ulama yang memiliki otoritas keagamaan secara kenegaraan, di antaranya adalah Teungku Abi Tu Bulqaini Tanjungan (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh dan Pimpinan Dayah Markaz al Ishlah al Aziziyah Banda Aceh. Selanjutnya Teungku Tarmizi, MA yang juga merupakan salah seorang anggota MPU kota Banda Aceh. Dan yang terakhir penulis mewawancarai Waled Rusli Daud, MA, beliau menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama kota Banda Aceh dan pimpinan dayah Mishrul Huda Malikussaleh yang juga di kota Banda Aceh.

Sedangkan untuk dapat mendalami bagaimana gerakan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, penulis telah mewawancarai pimpinan Ma'had As-Sunnah, Ustaz Harits Abu Nauval. Selain itu, penulis juga mewawancarai pemuda dan intelektual Salafi-Wahabi yang kerap menanggapi isu-isu perseteruan di ruang publik, Ustaz Nauval Pally Taran, SH. Penulis juga mewawancarai pengurus Masjid Oman Al Makmur Banda Aceh yang juga bagian di jamaah Salafi-Wahabi, Ustaz Yusbi Yusuf. Selain itu penulis juga telah

mewawancarai Ketua Wahdah Islamiyah Aceh Ustaz Hatta Selian, Lc, MA. Penulis juga telah berusaha untuk menemui beberapa tokoh Salafi-Wahabi yang lainnya. Namun para tokoh Salafi-Wahabi kota Banda Aceh terkesan takut untuk ditemui terlebih lagi untuk wawancara, pasca beberapa aksi kelompok dayah terhadap kegiatan mereka. Penulis telah berusaha menghubungi untuk menemui salah seorang tokoh Salafi-Wahabi yang fenomenal selama aksi-aksi kelompok dayah, namun tidak berhasil.

Tidak hanya kedua kelompok yang berseteru penulis wawancara. Namun juga beberapa para jamaah yang mengamati ketika pengusiran/pembubaran pengajian di Masjid Oman al Makmur kota Banda Aceh, di antaranya adalah Ustaz Ikhsan dan M. Ifrizal. Penulis juga berkesempatan mendiskusikan isu-isu ini dalam ruang terbuka-terbatas di warung-warung kopi dengan para akademisi, jamaah, masyarakat, secara tidak resmi dengan tujuan pengayaan data penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.

#### **b) Dokumentasi**

Untuk memperkaya sumber data yang berhubungan dengan kontestasi otoritas sosial keagamaan di kota Banda Aceh, penulis juga berusaha mendapat berbagai data berbentuk dokumentasi. Penulis telah berusaha membaca berbagai hasil penelitian lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan yang dilakukan di Aceh dan di kota Banda Aceh khususnya. Bentuk berbagai penelitian tersebut antara lain; jurnal, *proceeding* seminar, konferensi, dan buku-buku lainnya. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari berbagai dokumensi terkait perseteruan antara Salafi-Wahabi dan kelompok dayah dari berbagai media massa, baik *offline* maupun *online*. Baik itu berupa surat keputusan MPU Aceh, Surat Edaran Gubernur, surat kelompok Salafi-Wahabi kepada MPU Aceh, berita acara penanda tangan kesepakatan pada

parade *Aswaja*, dan lain sebagainya. Maupun berbagai pemberitaan dan dokumen yang tersebar pada berbagai media *online*, baik itu yang difasilitasi oleh kelompok dayah, Salafi-Wahabi, maupun dokumentasi dari pemerintah setempat.

Penulis juga mengamati berbagai dokumentasi dan informasi digital yang disebarakan melalui media sosial; *youtube*, *instagram*, *facebook*. Kolompok Salafi-Wahabi memiliki *chanel youtube* Media Sunnah Aceh, begitu juga dengan kelompok dayah dengan *chanel* MARA Aceh, walaupun tidak seaktif *chanel* kelompok Salafi-Wahabi. Kelompok Salafi-Wahabi juga memiliki akun *instagram* yang selalu memberikan berbagai informasi, nasehat dan jadwal pengajian baik secara *online* maupun *offline*. Begitu juga dengan *facebook*, kelompok dayah kerap membangun opini menggunakan akun pribadi dalam menanggapi fenomena sosial keagamaan di Aceh, khususnya pada akun Mustafa Husain Woyla, atau akun Ulama Aceh. Penulis juga mengumpulkan tulisan yang berupa gagasan dan tanggapan terhadap kontestasi otoritas sosial keagamaan yang terjadi antar dua kelompok ini, baik dari kedua kelompok ini, maupun dari para akademisi dan ulama di Aceh.

### c) Observasi

Untuk lebih memperkaya data dan dapat melakukan konfirmasi dan validasi data dari kedua sumber data sebelumnya, penulis juga telah melakukan observasi. Observasi penulis lakukan tidak hanya pada tempat atau Masjid di mana peristiwa pengusiran atau pembubaran jamaah pengajian berlangsung saja. Seperti Masjid Oman Al Makmur Lampriet, Masjid Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dan Masjid Al Fitrah Keutapang yang keduanya berada di kota Banda Aceh. Penulis juga melakukan observasi pada Masjid-masjid yang disinyalir dikelola dan ritual peribadatnya dilakukan sesuai keyakinan kelompok Salafi-Wahabi dan tentunya pada Masjid yang dengan ritual seperti kelompok

dayah. Pada Masjid Salafi-Wahabi penulis mengunjungi, turut beribadah dan mengikuti pengajian pada Masjid Cut Mutia, Masjid BPKP, Masjid Al Jihad, Masjid Baitul Muqarrabin, dan beberapa Masjid lainnya. Begitu juga beberapa Masjid yang tidak beritual seperti kelompok Salafi-Wahabi.

Terlihat kedua kelompok ini memiliki massa yang dapat dikatakan banyak. Khususnya kelompok Salafi-Wahabi yang masih terus eksis melakukan berbagai kegiatan dan pengajian. Penulis juga menyempatkan diri untuk berbelanja di tempat usaha kelompok Salafi-Wahabi yang selama ini merupakan penyandang dana berbagai kegiatan. Penulis juga mengunjungi Ma'had As-Sunnah, Lampeuneurut-Aceh Besar, di mana tempat ini menjadi pusat pendidikan kelompok Salafi-Wahabi dilangsungkan. Begitu juga kunjungan penulis pada dayah-dayah yang menjadi penyangga pendidikan ulama yang berbasis tradisional di kota Banda Aceh.

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif ini akan menggunakan metode analisis data interaktif, seperti yang disampaikan Mile dan Huberman. Data-data yang didapatkan akan dimasukkan dalam tiga proses kegiatan yang akan berlangsung secara terus menerus hingga selesai mencapai data penuh. Ketiga proses tersebut adalah reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi.<sup>93</sup>

Upaya analisis ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Data-data yang didapatkan melalui proses wawancara, dokumentasi dan observasi, *pertama* akan melalui proses reduksi data yang bertujuan melakukan penyeleksian, pemilahan, penajaman, pengorganisasian data dalam bentuk pola tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Selanjutnya *display* data dengan

---

<sup>93</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, trans. by Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2007), 21.



tujuan menyajikan data dalam bentuk sketsa, sinopsis, matriks yang sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan dalam upaya verifikasi data sebagai bagian dari tahapan akhir.

### **G. Sistematika Penulisan**

Keseluruhan laporan penelitian disertasi ini penulis sajikan dalam 6 (enam) bab kajian. Bab I dalam penelitian ini berisikan Pendahuluan, pada bab ini akan peneliti sajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan metode penelitian. Secara garis besar bab I merupakan gambaran bagaimana disertasi ini menyajikan kajian terdahulu, kajian teoritis dan metode penelitian sebagai bangunan yang penulis gunakan dalam membangun argumentasi.

Pada bab II penulis menyajikan kajian bagaimana sejarah keulamaan dan umat Islam di Aceh. Sejarah Islam di Aceh tidak terlepas dari peran ulama yang selalu dijadikan sebagai rujukan dan panutan dalam kehidupan masyarakat Aceh dari masa ke masa hingga saat ini. Kajian dalam bab ini penulis memaparkan beberapa hal yang penulis anggap penting, di antaranya adalah perkembangan pemahaman keulamaan seiring waktu mengalami perubahan di Aceh. Ulama yang sebelumnya selalu dikonotasikan dengan pemahaman sosok yang memahami seluk-beluk ilmu agama secara mendalam mulai bergeser. Pergeseran ini dimulai sejak gerakan keulamaan dan perjuangan umat Islam di Aceh mulai diwarnai oleh gerakan Pusat Ulama Seluruh Aceh (PUSA). PUSA merupakan sebuah keniscayaan dalam mengisi kemodernan umat Islam dan dinamika religiusitas di Aceh.

Bab III akan menyajikan kajian tentang sejarah, konstruksi, dan perkembangan kedua kelompok yang berkontestasi di Kota Banda Aceh. Keberadaan kedua kelompok, baik kelompok ulama dayah maupun Salafi-Wahabi memiliki catatan historis dalam tumbuh dan berkembangnya di Aceh. Kedua kelompok ini juga memiliki konstruksi pemahaman sosial-keagamaan yang saling

berbeda sejak era penjajahan Belanda. Perbedaan kedua pandangan ini pulalah yang kemudian menjadi keduanya terus bergerak, baik dalam mengembangkan gerakan maupun saling bersinggungan satu sama lain

Selanjutnya pada bab IV penulis memaparkan bagaimana konstruksi otoritas sosial-keagamaan berkontestasi dalam melakukan perebutan ruang publik, khususnya fasilitas ibadah. Bangunan otoritas sosial-keagamaan dalam masyarakat di kota Banda Aceh terlihat dalam 3 (tiga) konstruksi besar. *Pertama*, konstruksi tersebut dibangun dalam ruang kosmologi doktrin. Kosmologi doktrin utama Islam dalam masyarakat Aceh adalah ajaran *Ahl al-Sunnah al-Jamā'ah*. *Kedua*, bangunan kosmologi doktrin akan terbangun baik ketika ditopang ritual keagamaan. Kedua hal ini akan saling mendukung dalam rangka menstandarisasi ritual keagamaan. *Ketiga*, penulis juga akan memaparkan perebutan ruang publik yang berupa fasilitas keagamaan merupakan upaya peneguhan eksistensi dalam meneguhkan otoritas dalam ruang publik.

Bab V penulis menyajikan kontestasi kebijakan di ruang publik agama yang terjadi Aceh dan di Kota Banda Aceh khususnya. Ada 3 (tiga) dimensi yang menjadi kajian dalam bab ini. *Pertama* adalah desain kebijakan terdapat syariat Islam di Aceh, penulis akan memaparkan bagaimana usaha dari setiap pihak memengaruhi kebijakan terhadap ruang publik agama di Aceh. *Kedua*, setelah desain kebijakan penulis akan memaparkan bagaimana implementasi kebijakan syariat Islam di Aceh. Implementasi kebijakan syariat Islam tentunya mengalami berbagai dinamika dalam penerapannya, baik dari paradigma, implementasi hingga religiositas yang berkembang di sana. *Ketiga*, adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan syariat Islam tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai program kegiatannya. Masyarakat sipil yang berkontestasi memperebutkan otoritas di kota Banda Aceh juga melakukan hal tersebut. Baik kelompok ulama dayah maupun kelompok Salafi-Wahabi saling melakukan kontrol kebijakan.

Kedua kelompok ini memainkan peran, baik dalam penguatan maupun dalam pelemahan kebijakan di kota Banda Aceh.

Sedangkan pada Bab VI yang merupakan bab terakhir dalam pembahasan dalam disertasi ini. Pada bab ini penulis memaparkan bagaimana otoritas sosial-keagamaan dari kedua kelompok yang berseteru ini memperebutkan pengaruh massa. Baik massa maupun peran agensi yang dimainkan para pemilik otoritas sosial-keagamaan memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Kekuatan massa kerap dipraktikkan dalam membela atau mempertahankan otoritas keagamaan. Dan peran agensi pemilik otoritas memiliki kemampuan dalam memobilisasi massa. Baik massa maupun pemilik otoritas dapat saling memengaruhi satu sama lainnya.

Bab VII merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan atas temuan penelitian yang telah penulis lakukan dalam proyek penelitian disertasi ini. Selain kesimpulan, bab penutup juga memaparkan implikasi praktis dan rekomendasi penelitian lanjutan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Dan yang terakhir adalah kontribusi teoritis yang dapat penulis sumbangkan dari disertasi ini.



## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berangkat dari berbagai kajian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan di atas, disertasi ini menemukan hubungan dan korelasi yang sangat jelas antara kontestasi otoritas keagamaan dengan ruang publik agama, kebijakan, dan perebutan pengaruh massa di Aceh. Perdebatan teologis atau *'aqidah islamiyah* dan perseteruan pemahaman *mazhabiyah* dalam memahami fiqh atau hukum Islam bukanlah hal yang *urgent* dalam perkembangan sosial keagamaan di Aceh. Kendatipun penggunaan kedua isu tersebut selalu ditumbuhkembangkan dalam berbagai pengajian sosial-keagamaan di Aceh. Lebih jauh daripada itu, bahkan kedua kajian perseteruan cenderung dimanfaatkan atau dieksploitasi untuk mendapatkan hal lebih besar dalam ruang lingkup agama yang lebih luas. Sehingga terlihat orientasi untuk terus melakukan penelaahan dalam kajian tersebut selalu mendapat tempat di setiap pengajian dalam ruang publik di Kota Banda Aceh.

Kontestasi otoritas sosial keagamaan antara ulama dayah dan Salafi-Wahabi tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab agensi dari kedua kubu. Perseteruan kedua kelompok yang dimotori oleh para pemuka agama ini, tiak hanya berada dalam ruang publik agama, kebijakan pemerintah, namun juga memperebutkan pengaruh massa dalam implementasi syariat Islam di Aceh—di mana masyarakat menjadikan ulama sebagai rujukan utama dalam bersyariat. Ruang publik, kebijakan publik pemerintah yang selama ini dipahami sebagai ruang dan media yang netral dari berbagai intervensi dan tekanan dari bentuk apapun, namun berbeda dengan Aceh, ruang publik dan kebijakan pemerintah menjadi ruang publik dan kebijakan agama sejak dideklarasikan/ditahbiskan syariat Islam sebagai landasan kehidupan masyarakat. Keberadaan ruang publik dan kebijakan pemerintah di Aceh tidak membuka ruang yang *equal*

dan bebas bagi masyarakat dalam memahami sosial-keagamaan, melainkan menutup diri dari pengembangan pemahaman terhadap publik yang setara.

Kontestasi otoritas sosial keagamaan antara ulama dayah dan Salafi-Wahabi menjadikan sosial-keagamaan masyarakat di Kota Banda Aceh berada dalam arena yang selalu dipertaruhkan. Ada tiga ruang atau celah dimana konteks sosial-keagamaan yang masih terus dipertaruhkan antara kedua kelompok ini; 1) Ruang Publik Agama dalam bentuk fasilitas agama; Masjid dan Mushalla, lembaga pendidikan atau yayasan, 2) Kebijakan, mempengaruhi kebijakan pemerintah agama dalam sosial-keagamaan, dan 3) Massa, memperebutkan dan mempengaruhi keberadaan massa sebagai kekuatan setiap kelompok. Ketiga celah dan ruang ini inilah yang menjadi agenda kontestasi otoritas keagamaan yang berlangsung di Kota Banda Aceh. Sedangkan perdebatan teologis dan *mazhabiyah* yang terjadi di Aceh merupakan sesuatu yang cenderung ditampakkan di luar.

### **Temuan Penelitian**

Ruang publik merupakan ruang di mana semua orang dapat menyampaikan gagasan, pikiran, wacana, sikap, *attitude* dan lain sebagainya. Ruang publik akan memberikan kebebasan selama setiap orang dapat menghargai setiap rasionalitas yang disampaikan, menghormati pilihan banyak orang dalam ruang yang tak terbatas, tidak terkecuali dalam dimensi keagamaan. Namun dinamika yang terjadi dalam syariat Islam di Aceh, terbatas dalam ruang pemahaman yang dipahami oleh dua kelompok otoritas keagamaan yang berkontestasi. Berikut 3 temuan penelitian yang akan peneliti sampaikan dalam fenomena kontestasi otoritas keagamaan yang terjadi di Kota Banda Aceh.

*Pertama*, Ruang Publik Agama (Public Islam); Fasilitas Ibadah. Terlihat di berbagai kabupaten/kota perebutan fasilitas ibadah ini terjadi, khususnya di Kota Banda Aceh. Perseteruan Ideologi dan ritual peribadatan mulai bergeser pada peneguhan

eksistensi di ruang publik dengan menguasai fasilitas dalam beragama. Baik kelompok Salafi-Wahabi maupun ulama dayah berusaha dan berupaya melakukan perebutan ruang publik agama melalui fasilitas yang dapat dikuasai. Baik dengan cara menjadi pengurus, penceramah, mengisi berbagai majelis taklim, hingga mengusir, menghentikan berbagai kegiatan pada fasilitas agama tersebut. Penguasaan ruang publik agama yang berupa fasilitas ibadah tidak dilakukan begitu saja oleh kedua kelompok ini, melainkan dengan metode dan strategi masing-masing kelompok, tahapan yang dilakukan di antaranya adalah: 1) Penanaman i'tiqad *Ahl al-Sunnah wal Jamā'ah*, 2) Penyeragaman dan standarisasi dalam beribadah, 3) Peneguhan eksistensi gerakan dengan menguasai fasilitas ibadah yang berupa Masjid dan Mushalla. Ketiga tahapan ini dilakukan dengan menggunakan celah dan peluang dari berbagai sisi, baik dalam pengajian-pengajian maupun berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan kedua kelompok yang berseteru.

*Kedua*, Kebijakan Sosial-Keagamaan. Mengingat Aceh adalah daerah yang telah menerapkan syariat Islam. Mempengaruhi untuk mendapatkan bentuk kebijakan yang memihak menjadi penting untuk diperebutkan oleh kelompok Salafi-Wahabi dan ulama dayah. Kedua kelompok ini memiliki kemampuan untuk mengakses kebijakan yang sangat berbeda. Kelompok dayah memiliki kemampuan yang lebih baik, terlebih lagi ketika para ulama dayah telah banyak berada dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh maupun di tingkat provinsi. Sangat mudah bagi kelompok dayah mendesak untuk dikeluarkan kebijakan. Salah satunya fatwa MPU Aceh tentang kesesatan Salafi-Wahabi, sedangkan kelompok Salafi-Wahabi cenderung mendekati kebijakan secara personal, misalnya ketika Elliza Sa'aduddin Djamal menjadi Walikota Banda Aceh sehingga ruang geraknya menjadi lebih luas saat itu. Begitu juga pada beberapa instansi pemerintah, kelompok Salafi-Wahabi sempat menjadi

pemateri/penceramah, seperti Kantor BPKP, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dan lainnya di Aceh.

*Ketiga*, Perebutan Pengaruh Massa. Keberadaan massa di Kota Banda Aceh cenderung lebih plural dan beragam. Tidak hanya otoritas keagamaan kelompok dayah yang berkembang, namun juga terdapat berbagai otoritas keagamaan lainnya. Perseteruan antara kelompok Salafi-Wahabi dan ulama dayah, tidak jarang juga menjadikan massa sebagai penjaga otoritas keagamaan. Umpamanya terlihat dari pergerakan massa dari kelompok dayah ketika melakukan pengusiran atau pembubaran pengajian yang dilakukan oleh kelompok Salafi-Wahabi. Kelompok Salafi-Wahabi juga memiliki massa dan kekuatan yang cukup, walaupun tidak sebanyak kelompok dayah—namun kelompok ini tetap berani melakukan berbagai kegiatan walaupun berada dalam kecaman. Hal ini tidak terlepas dari peran agensi yang dimainkan oleh kedua pihak dalam mengelola otoritas keagamaan dalam memobilisasi massa. Perebutan pengaruh massa menjadi hal penting dalam mengelola dan menjadi gerakan dalam ruang publik agama. Sehingga tidak jarang otoritas keagamaan berada dalam legitimasi pengaruh massa.

### **Refleksi Teoritis**

Ruang publik agama tidak seperti halnya ruang publik yang berkembang di Barat yang dituliskan oleh Habermas. Ruang publik agama yang cenderung dipahami memiliki tingkat *absolutisme* yang tinggi, kerap menjadikan kelompok mayoritas dalam mendominasi kelompok minoritas dalam beragama. Berbeda dengan ruang publik yang dipahami dalam ruang publik sekuler. Walaupun kemudian Habermas mengklarifikasi kembali tidak mungkin menegasikan ruang publik dengan agama, sehingga melahirkan gagasan barunya dengan ruang publik post-sekuler. Agama akan tetap ada di dalam ruang publik, namun hanya dalam bentuk nilai-nilai yang sudah diadaptasikan dengan ruang publik sekuler. Sehingga ruang publik sekuler tidak kehilangan nilai-nilai agamanya.



Kajian disertasi ini mencoba menyumbangkan kajian teoretis yang lebih mengarah para kajian kontestasi otoritas keagamaan. Salah satunya pada kajian ruang publik agama, Eickelman dan Salvatore menyebutnya dengan *Public Islam*. Kontestasi otoritas sosial-keagamaan di Aceh menunjukkan perseteruan antara Salafi-Wahabi dan ulama dayah tidak hanya menysasar pada mempertahankan ideologi dan teologi yang diyakininya. Keberadaan teologi dan ideologi yang diyakini oleh masing-masing pihak adalah hal yang tidak dapat dirubah atau dipaksakan dengan kekuatan apapun. Namun kekuatan itu dapat ditekan, dipersempit dan dihentikan pergerakannya dengan kekuatan yang lain. Perdebatan wacana di ruang publik cenderung mengulang kajian-kajian lama yang berakhir dengan bentrokan, mengingat wacana teologis sangat berhubungan dengan penafsiran teks suci yang diyakini oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menemukan bahwasanya kontestasi otoritas keagamaan antara dua kelompok yang berseteru ini tidak hanya dalam ruang wacana, namun mengarah perebutan pada fasilitas ruang publik yang berbentuk ruang ibadah, mempengaruhi kebijakan sosial-keagamaan, dan memperebutkan keberadaan massa atau jamaah. Perdebatan wacana tidak lebih dilakukan untuk merebut simpati dan penegasan keilmuan dan kealiman masing-masing pihak, namun tujuan lebih besar dari itu. Dengan menguasai fasilitas, kebijakan, dan massa, maka otoritas yang dimiliki masing-masing pihak akan sempurna dalam kekuasaan. Jika Eickelman dan Salvatore mencoba mengonstruksikan publik Islam mayoritas untuk mengedepankan *common good* yang dalam bahasa agamanya di kenal *mashlahah al-'ammah*. Ruang *public Islam* di Aceh dapat mengonstruksikan ketiga ruang publik agama tersebut dalam kerangka *mashlahah al-'ammah*, nilai keadilan dan tanpa mereduksi nilai-nilai tradisi yang telah ada sebelumnya.

## **B. Saran: Rekomendasi Penelitian Lanjutan**

Selanjutnya adalah rekomendasi studi atau penelitian lanjutan. Tentunya pasca proyek penelitian disertasi ini, masih banyak hal

yang harus dijadikan objek penelitian terkait dengan isu ini. Penelitian ini dan yang lain belum memotret secara mendalam bagaimana gerakan Salafi-Wahabi berdiaspora di Aceh. Salafi-Wahabi merupakan gerakan baru di Aceh yang dapat berkembang dengan cepat di klaster perkotaan, khususnya Kota Banda Aceh. Begitu juga halnya dengan penelitian untuk kelompok dayah yang selama ini selalu berinteraksi dengan masyarakat di daerah-daerah. Ketika kelompok dayah memasuki masyarakat kota tentunya terdapat perubahan otoritas sosial-keagamaan, karena membutuhkan otoritas dan ruang publik lainnya dalam mendukung otoritas keagamaannya. Ekspansi kelompok dayah memasuki kota-kota yang memiliki tingkat pluralitas yang berbeda tentunya akan menghadapi berbagai masalah yang juga layak untuk dikaji.

Selain itu, kajian tentang bagaimana eksistensi kelompok Salafi-Wahabi pasca keributan dan pelarangan dalam beraktivitas di Kota Banda Aceh, juga pantas dijadikan kajian lanjutan dari penelitian ini. Mengingat kelompok Salafi-Wahabi bukanlah kelompok yang hanya dapat berdiam ketika berada di bawah tekanan. Ada banyak kegiatan yang dapat terus dilakukan kendatipun berada di bawah pengawasan masyarakat dayah. Begitu juga dengan kelompok dayah, banyak usaha-usaha yang terus dilakukan dalam menguatkan posisi dan keberadaannya dalam perkotaan. Kelompok dayah juga sangat unik jika dijadikan kajian lanjutan dari penelitian ini. Mulai dari banyaknya para alumni dayah yang telah memasuki pendidikan kampus, yang sebelumnya menganggap pendidikan agama hanyalah yang berbasis dayah. Melalui pintu gerbang pendidikan kampus para alumni dayah terus melaju dan mulai berperan dalam berbagai bidang—juga berkontribusi pada lembaga dayah di mana mereka berasal.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku & Jurnal

- Abubakar, Al Yasa', *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan*, III (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005)
- Abubakar, Marzuki, 'Berebut Masjid: Resistensi dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal di Aceh terhadap Aliran Islam Pendatang', *PENAMAS*, 29.3 (2016), 359–72
- Adan, Hasanuddin Yusuf, *Teungku Muhammad Dawud Beureu-Eh Dan Perjuangan Pemberontakan Di Aceh*, Cet. 1 (Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh & Ar-Raniry Press, 2007)
- Addi, Lahouari, 'Islam Re-Observed: Sanctity, Salafism, and Islamism', *The Journal of North African Studies*, 14.3–4 (2009), 331–45  
<<https://doi.org/10.1080/13629380902923978>>
- Adi, M, 'Telaah Kritis atas Konsep Kosmologi dalam Islam menurut Sayyed Hossein Nasr' (unpublished Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) <<http://digilib.uin-suka.ac.id/37405/>> [accessed 1 April 2021]
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, 'Educational Practice: Lessons to Be Learned from Madrasah and Religious Schools in Contemporary Southeast Asia', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5.1 (2015), 29–48  
<<https://doi.org/10.18326/ijims.v5i1.29-48>>
- , 'The Application of Islamic Law in Indonesia; The Case Study of Aceh', *International Journal Of Indonesian Islam-Australia*, Vol 01, Number 01, June 2007 (2007)
- AK, Baihaqi, 'Ulama dan Madrasah Aceh', in *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Press & Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1983), pp. 112–208

- Akmal, Saiful, Rizkika Lhena Darwin, and Siti Nur Zalikha, “‘ZIKIR GEMILANG’ Elit Politik Di Banda Aceh: Wacana Populis Atau Kebijakan Publik?’, *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5.1 (2020), 58 <<https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.26548>>
- Alfian, ‘The Ulama in Acehnese Society; A Preliminary Observation’, *Southeast Asian Journal of Social Science*, 3.1 (1975), 27–41
- Alfian, Ibrahim, *Perang Di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912*, Cetakan I (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016)
- Amghar, Samir, ‘The Muslim World League in Europe: An Islamic Organization to Serve the Saudi Strategic Interests?’, *Journal of Muslims in Europe*, 1.2 (2012), 127–41 <<https://doi.org/10.1163/22117954-12341234>>
- Amiruddin, M. Hasbi, *Perjuangan ulama Aceh di tengah konflik* (Yogyakarta: Ceninets Press, 2004)
- Ansor, Muhammad, ‘Post-Islamism and the Remaking of Islamic Public Sphere in Post-Reform Indonesia’, *Studia Islamika*, 23.3 (2016), 471–515 <<https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.2412>>
- Anwar, M. Zainal, ‘Formalisasi Syari’at Islam Di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik Dalam Kebijakan Publik’, *Millah*, 10.2 (2011), 191–212 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art1>>
- Anwar, Rosihan, and Abdu Rozak, *Ilmu Kalam*, IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
- Aswar, Hasbi, ‘Politik Luar Negeri Arab Saudi dan Ajaran Salafi-Wahabi di Indonesia’, *The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1.1 (2016), 15–30
- Azra, Azyumardi, ‘Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society’, *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and*

- Heritage (e-Journal)*, 4.1 (2015), 85–114  
<<https://doi.org/10.31291/hn.v4i1.63>>
- , ‘Political Islam in Post-Soeharto Indonesia’, in *Islamic Perspectives on the New Millennium*, ed. by Amin Saikal and Virginia Hooker (ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2004), pp. 133–49 <<https://www.cambridge.org/core/books/islamic-perspectives-on-the-new-millennium/political-islam-in-postsoeharto-indonesia/CCED8F91908905DA1FF0515308EE4D78>> [accessed 4 September 2020]
- Baiquni, Baiquni, ‘Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri; Sebuah Biografi Singkat Ulama Reformis Dan Pejuang’, *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 4.2 (2016) <<http://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/27>> [accessed 9 July 2020]
- Berutu, Ali Geno, *ACEH DAN SYARIAT ISLAM* (Open Science Framework, 14 December 2019) <<https://doi.org/10.31219/osf.io/q5b8n>>
- Bourdieu, Piere, *Arena Produksi Kultural ‘Sebuah Pengkajian Sosiologi Budaya’*, trans. by Yudi Santosa, II (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012)
- , *Outline of a Theory of Practice*, trans. by Richard Nice, XXVIII (Cambridge: Cambridge University Press, 2013) <<https://book.cc/2363468/a8ca17?dsource=recommend>> [accessed 1 February 2020]
- Bourdieu, Pierre, *Distinction A Social Critique of the Judgement of Taste*, trans. by Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press, 1984)
- van Bruinessen, Martin, ‘Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the “Conservative Turn” of the Early Twenty-First Century’, 2013, 1–20

- Chaplin, Chris, *Salafism and the State: Islamic Activism and National Identity in Contemporary Indonesia*, Nordic Institute of Asian Studies, Monograph Series, no. 155 (Copenhagen: NIAS Press, 2021)
- Commins, David, 'From Wahhabi to Salafi', in *Saudi Arabia in Transition*, ed. by Bernard Haykel, Thomas Hegghammer, and Stéphane Lacroix (New York: Cambridge University Press, 2015), pp. 151–66 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781139047586.011>>
- , 'Saudi Arabia in Transition: Insights on Social, Political, Economic and Religious Change', in *From Wahhabi to Salafi*, ed. by B Haykel, T Hegghammer, and S Lacroix (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), pp. 151–66 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781139047586.011>>
- Commins, David Dean, *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*, 2006
- Connolly, Peter, ed., *Aneka Pendekatan Studi Agama*, trans. by Imam Khoiri, IV (Yogyakarta: LKiS, 2012)
- Dewi, Ernita, and Eka Januar, 'A Comprehension Transfer of Wahabiyah in Pengajian System in Dayah Tradisional Aceh', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4.1 (2019), 35–52 <<https://doi.org/10.18326/mlt.v4i1.%p>>
- Duhri, Saifuddin, 'Dayah dalam Tiga Phase Perkembangan; Menelaah Pendidikan Berbasis Perubahan Sosial yang telah Punah', *SARWAH*, Januari-Juni 2011, IX.4 (2011), 17
- Eickelman, Dale F., and Armando Salvatore, 'The Public Sphere and Muslim Identities', *European Journal of Sociology*, 43.1 (2002), 92–115 <<https://doi.org/10.1017/S0003975602001030>>
- El-Sharif, Farah, 'The Rhetoric of Twentieth-Century Damascene Anti-Salafism', *Contemporary Levant*, 5.2 (2020), 113–25 <<https://doi.org/10.1080/20581831.2020.1767400>>

- Fadl, Khaled Abou El, *Sejarah Wahabi & Salafi: mengerti jejak lahir dan kebangkitan di era kita* (Serambi Ilmu Semesta, 2015)
- Fadlia, Faradilla, Novi Susilawati, Ismar Ramadani, and Novita Sari, 'Deterring or Entertaining? Can the Caning Punishment Execution in Aceh Meet Its Objective?', *Mazahib*, 19.1 (2020), 41–78 <<https://doi.org/10.21093/mj.v19i1.2055>>
- Faizin, T., Mohd. Hatta, and Abdullah Abdullah, 'Tastafi Communication Strategy in the Development of Madani Community', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2.2 (2019), 271–83 <<https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.260>>
- Fauzi, Niki Alma Febriana, 'The Tajdid Movement of Muhammadiyah in Aceh "Negotiating Identity Between Salafism and Modernism"', *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 13.2 (2016), 155–70
- Feener, R. Michael, 'Introduction; Islamic Law in Indonesia: Formation of a Modern Tradition', in *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions* (Cambridge: Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School, 2007), p. 223
- , 'Muslim Religious Authority in Modern Asia: Established Patterns and Evolving Profiles', *Asian Journal of Social Science*, 42.5 (2014), 501–16
- , *Shari'a and Social Engineering The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (United Kingdom: Oxford University Press, 2013)
- , 'State Shari'a and Its Limits', *Islam and the Limits of the State*, 2016, 1–23 <[https://doi.org/10.1163/9789004304864\\_002](https://doi.org/10.1163/9789004304864_002)>
- Foucault, Michel, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas* (Jakarta: Gramedia, 1997)

- , *Wacana Kuasa/Pengetahuan* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002)
- Gazalba, Sidi, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, VI (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 1994)
- Geertz, Clifford, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013)
- Habermas, Jürgen, ‘The Public Sphere: An Encyclopedia Article’, in *Media and Cultural Studies: Keywords*, ed. by Meenakshi Gigi Durham and Douglas Kellner, *Keywords in Cultural Studies*, 2, Rev. ed (Malden, MA: Blackwell, 2006), pp. 73–78
- Habermas, Jürgen, *Ruang Publik: Sebuah Kajian, Tentang Kategori, Masyarakat Borjuis*, Cet. 3 (Pasar Minggu, Jakarta: Balesastra Pustaka, 2012)
- Habermas, Jürgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere ‘An Inquiry into a Category of Bourgeois Society’*, trans. by Thomas Burger (Germany: MIT Press, 1989)
- Hadi, Abdul, ‘The Internalization of Local Wisdom Value in Dayah Educational Institution’, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5.2 (2017), 189–200  
<<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v5i2.128>>
- Hamzah, Murizal, *Hasan Tiro: Jalan Panjang Menuju Damai Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015)  
<<https://bandarpublishing.com/hasan-tiro-jalan-panjang-menuju-damai-aceh-2/>> [accessed 1 April 2021]
- Hanafiah, Hanafiah, ‘Dayah Collectively as a Social Movement’, *International Journal of Human Rights in Healthcare*, 11.1 (2018), 56–64 <<https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0034>>



- Hardiman, Francisco Budi, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum Dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jorgen Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009)
- Haryanto, *Elit, Massa, Dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*, ed. by Devananta Rafiq, I (Yogyakarta: Polgov, 2017)
- Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat 'Akar Kekerasan dan Dominasi'* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- , *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (Yogyakarta: KANISIUS, 2016)
- Hasan, Ismail, 'Tasawuf: Jalan Rumpil Menuju Tuhan', *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 1.1 (2014), 45–63
- Hasan, Noorhaidi, '9. The Salafi Madrasas of Indonesia', in *The Madrasa in Asia*, ed. by Farish A Noor, Yoginder Sikand, and Martin van Bruinessen (Amsterdam University Press, 2009), pp. 247–74 <<https://doi.org/10.1515/9789048501380-011>>
- , 'Faith and Politics: The Rise of the Laskar Jihad in the Era of Transition in Indonesia', *Indonesia*, 73 (2002), 145–69 <<https://doi.org/10.2307/3351472>>
- , *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2008)
- , 'Salafism in Indonesia: Transnational Islam, Violent Activism, and Cultural Resistance', in *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, ed. by Robert W. Hefner and Barbara Watson Andaya, Routledge Handbooks (Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2018), pp. 246–56
- , 'The Failure of the Wahhabi Campaign: Transnational Islam and the Salafi Madrasa in Post-9/11 Indonesia', *South East*

- Asia Research*, 18.4 (2010), 675–705  
<<https://doi.org/10.5367/sear.2010.0015>>
- , ‘The Salafi Movement in Indonesia: Transnational Dynamics and Local Development’, *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 27.1 (2007), 83–94  
<<https://doi.org/10.1215/1089201x-2006-045>>
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- Hasni, Khairul, ‘English Sharia Police: Gender Discrimination, and Elite Politics in Aceh’, *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 4.1 (2020), 30–43  
<<https://doi.org/10.35723/ajie.v4i1.57>>
- Hasyimi, Ali, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983)
- Hasymy, Ali, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Hedi, Hedi, ‘Agama Dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jürgen Habermas’, *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 3.2 (2020), 249  
<<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-07>>
- Hirschkind, Charles, ‘Civic Virtue and Religious Reason: An Islamic Counterpublic’, *Cultural Anthropology*, 16.1 (2001), 3–34  
<<https://doi.org/10.1525/can.2001.16.1.3>>
- Hoesin, Moehammad, *Islam Dan Adat Aceh: Bagaimana Ajaran Islam Mewarnai Adat Istiadat Aceh*, Cetakan kedua (Banda Aceh: LSKPM, 2018)
- Hoigilt, J., and F. Nome, ‘Egyptian Salafism in Revolution’, *Journal of Islamic Studies*, 25.1 (2014), 33–54  
<<https://doi.org/10.1093/jis/ett056>>

- Huwaida, Huwaida, 'Change and Development in The Acehese Dayah Salafi (A Case Study)', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3.2 (2015), 279–94
- Ibrahimy, Muhammad Nur El, *Teungku Muhammad Daud Beureueh: Peranannya Dalam Pergulakan Di Aceh* (Gunung Agung, 1986)
- Ichwan, Moch Nur, 'Alternative to Shariatism: Progressive Muslim Intellectuals, Feminist, Queers and Sufis in Comtemporary Aceh', in *REGIME CHANGE, DEMOCRACY AND ISLAM THE CASE OF INDONESIA* (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), p. 354  
<<https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-privaatrecht/jeugdrecht/irpfinal20132.pdf>>
- , 'FATAWA AND DIFFERENCE: Official Ulama, "Aswaja" and Salafism in Aceh, Indonesia', in *Contestation, Pluralization, and New Actors* (presented at the Conference on Religious Authority in Indonesian Islam, Singapore: Yusof Ishak Institute ISEAS-LIPI, 2018)
- , 'Neo-Sufism, Shariatism, and Ulama Politics: Abuya Shaykh Amran Waly and the Tauhid-Tasawuf Movement in Aceh', in *Islam, Politics and Change : The Indonesian Experience after the Fall of Suharto*, ed. by Kees van Dijk and Nico J.G. Kaptein (Leiden: Leiden University Press (LUP), 2016)  
<<https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/38574>>  
[accessed 23 January 2020]
- , 'Official Ulema And The Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh', *Journal of Islamic Studies*, 22.2 (2011), 183–214
- Idria, Reza, 'Cultral Resistance to Shariat Ism in Aceh', in *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia* (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), p. 354

- Idris, Mulyana, and Muhammad Sahlan, 'Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut terhadap Wahabi', *SUBSTANTIA*, 20.1 (2018), 80–89 <<https://doi.org/10.22373/substantia.v20i1.3407>>
- Ilyas, Mukhlisuddin, 'Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18.3 (2016), 469–84
- Ilyas, Mukhlisuddin, Zainuddin, Abdul Muin Sibuea, and Zahrila, 'Leadership Transformation; Study of Islamic Boarding School (Dayah) in ACEH Province of Indonesia', *Journal of Entrepreneurship Education*, 22.2 (2019) <<https://www.abacademies.org/abstract/leadership-transformation-study-of-islamic-boarding-school-dayah-in-aceh-province-of-indonesia-7811.html>> [accessed 12 January 2020]
- Isa, Abdul Gani, *Formalisasi Syari'at Islam Di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya, Dan Hukum*, Cetakan pertama (Banda Aceh: PeNA, 2013)
- Ismuha, 'Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah', in *Agama dan Perubahan Sosial.*, ed. by Taufik Abdullah (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Jamal, Anton, Muhammad Muhammad, Asy'ari Asy'ari, and Noviandy Noviandy, 'Pemetaan Syariat Islam Di Aceh Problematika Dan Solusi', *Istiqro*, 16.01 (2018), 103–38
- Jamal, Anton, Noviandy, Muhammad Juhari, and Asy'ari, *Pemetaan Syariat Islam Di Aceh* (Meulaboh: STAI Teungku Dirundeng, 2013), p. 269
- Jamal, Anton, Noviandy, Zaini Masni, Armawi Sullati, Asy'ari, and Muhammad, *Perempuan dan Hak Asasi Manusia 'Narasi Agama dalam Imajinasi Negara Bangsa di Aceh'*, ed. by Noviandy and Zubir (Malang: PUSAM UMM, 2018)

- Jauhari, Iman, 'Pelaksanaan Dan Penegakan Syariat Islam Di Provinsi Aceh', *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, 28.1 (2010) <<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1067>> [accessed 22 March 2021]
- Johnson, Constance, 'Indonesia: Aceh Stoning Provision Deleted, Other Shariah-Influenced Rules Controversial | Global Legal Monitor', 2013 <<http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/indonesia-aceh-stoning-provision-deleted-other-shariah-influenced-rules-controversial/>> [accessed 23 January 2019]
- Juhari, Juhari, 'Respon Ulama Dayah Darussa'adah Terhadap Problema Sosial Keagamaan Di Aceh', *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 22.2 (2016) <<https://doi.org/10.22373/albayan.v22i34.877>>
- Kamahi, Umar, 'Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik', *Jurnal Al-Khitabah*, 3.3 (2017) <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/view/2926>> [accessed 9 February 2020]
- Khairil, Miswar, 'Tragedi Samalanga dan Runtuhnya Kearifan', *Serambi Indonesia* (Banda Aceh, 2017) <<http://aceh.tribunnews.com/2017/10/27/tragedi-samalanga-dan-runtuhnya-kearifan>> [accessed 24 January 2019]
- Kingsbury, Damien, 'The Free Aceh Movement: Islam and Democratisation', *Journal of Contemporary Asia*, 37.2 (2007), 166–89 <<https://doi.org/10.1080/00472330701253759>>
- Kloos [a], David, 'A Crazy State: Violence, Psychiatry, and Colonialism in Aceh, Indonesia, ca. 1910-1942', *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, A Crazy State, Vol. 170, No. 1, 2014 (2014), 25–65 <<https://doi.org/10.1163/22134379-17001>>
- Kloos [b], David, 'In The Name Of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia',

*Cornell University Press*, Number 98, October 2014 (2014), 59–90 <<https://doi.org/10.1353/ind.2014.0020>>

Kloos, David, *Becoming Better Muslims: Religious Authority and Ethical Improvement in Aceh, Indonesia* (the United Kingdom: Princeton University Press, 2018)

———, ‘In the Name of Syariah?: Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia’, *Indonesia*, 98.1 (2014), 59–90 <<https://doi.org/10.1353/ind.2014.0020>>

———, ‘Strengthening Local Leadership: Sharia, Customs, and The Dynamics of Vigilante Violence in Aceh’, in *Regime Change, Democracy and Islam: The Case of Indonesia* (Leiden: Universiteit Leiden, 2013), p. 354

———, ‘The Saliency of Gender: Female Islamic Authority in Aceh, Indonesia’, *Asian Studies Review*, VOL. 40, NO. 4 (2016), 527–44 <<https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1225669>>

Kobo, Ousman Murzik, ‘Shifting Trajectories of Salafi/Ahl-Sunna Reformism in Ghana’, *Islamic Africa*, 6.1–2 (2015), 60–81 <<https://doi.org/10.1163/21540993-00602003>>

de Koning, Martijn, ‘The Moral Maze: Dutch Salafis and the Construction of a Moral Community of the Faithful’, *Contemporary Islam*, 7.1 (2013), 71–83 <<https://doi.org/10.1007/s11562-013-0247-x>>

Latif, Hamdiah A., ‘Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA): Its Contributions to Educational Reforms in Aceh’ (McGill University, 1992) <<https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/0z708x912>> [accessed 8 July 2020]

Makin, Al, ‘Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat dan Hegemoni Barat’, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 11.1 (2016), 113–34 <<https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.113-134>>

- Marzuki, Marzuki, 'Diniyah in Public Schools: A Model of Islamic Curriculum Implementation in Multi Religious Society in Banda Aceh Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4.1 (2016), 15 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v4i1.82>>
- Matsyah, Ajidar, *Jatuh Bangun Kerajaan Islam Di Aceh*, I (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, trans. by Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2007)
- Mirjam Künkler, David Kloos, 'Studying Female Islamic Authority: From Top Down to Bottom-Up Modes of Certification', *Asian Studies Review*, Vol. 40, No. 4, 2016 (2016), 479–90 <<https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1227300>>
- Miswar, Khairil, 'Wahabi Dalam Perspektif HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) & Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan di Aceh' (UIN Ar-Raniry, 2019)
- Mizaj, Mizaj, 'Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 1.3 (2018), 13–22 <<https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.27>>
- Moch, Harun, *Memahami Orang Aceh*, Cet. 1 (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2009)
- Mohamed Bin Ali and Muhammad Saiful Alam Shah Bin Sudiman, "Salafis and Wahhabis: Two Sides of the Same Coin?," *Www.Rsis.Edu.Sg*, last modified Oktober 2016, accessed December 5, 2021, <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co16254-salafis-and-wahhabis-two-sides-of-the-same-coin/#.YaxZY9JBzIW>.
- Morris, Eric, 'Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangan Islam', in *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, ed. by Audrey R Kahin, trans. by Satyagraha Hoerip (Jakarta: Grafiti, 1990), p. 309

- Muhajir, Azis, 'Politik Daud Beureueh Dalam Gerakan DI/TII Aceh', *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 4.1 (2016) <<http://journal.lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/18>> [accessed 9 July 2020]
- Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*, Cet. 1 (Banda Aceh, Indonesia: Kerjasama IAIN ar-Raniry, Nanggroe Aceh Darussalam dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu, 2003)
- Muntasir, 'The Social Role of Ulama Dayah to Aceh Society, Indonesia', *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 23, Issue 1.1 (2018), 18–24 <<https://doi.org/10.9790/0837-2301051824>>
- Nasution, Ismail Fahmi Arrauf, and MIswari Miswari, 'Al-“Ulamaā” Waratsat Al-Anbiyā’: Modernity and Nurture of Authority in Aceh Society', *Jurnal THEOLOGIA*, 30.2 (2019), 197 <<https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.2.3845>>
- Nirzalin, Nirzalin, 'Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku Dayah di Aceh', *SUBSTANTIA*, 20.2 (2018), 185–95 <<https://doi.org/10.22373/substantia.v20i2.5155>>
- , 'Konsep Dan Hirarkhi Teungku Di Aceh', *Jurnal PASAI*, 7.1 (2013), 172–92
- , *Ulama dan Politik di Aceh 'Menelaah Hubungan Kekuasaan Tengku Dayah dan Negara'*, I (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2012)
- Nirzalin, Nirzalin, and Yogi Febriandi, 'Teungku Dayah Agency and Religious Social Capital on Drug Eradication in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23.3 (2020), 210 <<https://doi.org/10.22146/jsp.51061>>
- Noerdin, Edriana, *Politik Identitas Perempuan Aceh*, Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: Women Research Institute, 2005)



- Noviandy, *Hak Asasi Manusia Di Negeri Syariat “Tinjauan Etika Politik Terhadap Rancangan Qanun Jinayah Di Aceh* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014)
- , *Penegakan HAM Di Negeri Syariat ‘Proses Perumusan Qanun Jinayah Dalam Perspektif Etika’* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)
- Noviandy, Noviandy, and Muhammad Alkaf, eds., *Memuliakan Keragaman ‘Pembentukan Kesalehan Artikulasi Islam Aceh’*, 1, 1st edn (Langsa: ZAWIYAH Serambi Ilmu Pengetahuan)
- Nurdin, Abidin, ‘Peran Ulama Dan Umara Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh’ (unpublished Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2017)
- , ‘Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam Di Aceh’, *Al-Qalam*, 18.1 (2016), 54  
<<https://doi.org/10.31969/alq.v18i1.244>>
- Nurhasim, Moch, ed., *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan, Dan Upaya Penyelesaian* (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2003)
- , *Konflik Dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Kajian Tentang Konsensus Normatif Antara RI-GAM Dalam Perundingan Helsinki*, Cet. 1 (Yogyakarta: Jakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar ; P2P-LIPI, 2008)
- Nurlaila, Nurlaila, and Zulihafnani Zulihafnani, ‘Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh’, *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21.2 (2019), 93–103  
<<https://doi.org/10.22373/subtantia.v21i2.3742>>
- Pals, Daniel L., *Seven Theories of Religion* (Oxford University Press, 1996)

- Perbawati, Candra, 'Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam', *AL- 'ADALAH*, 12.2 (2015), 843–54 <<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.216>>
- Permana, Yogi Setya, 'Subnational Sectarianisation: Clientelism, Religious Authority, and Intra-Religious Rivalry in Aceh', *Religion, State and Society*, 49.2 (2021), 142–56 <<https://doi.org/10.1080/09637494.2021.1881392>>
- Petré, Christine, 'Tunisian Salafism: The Rise and Fall of Ansar al-Sharia', *POLICY BRIEF*, 209 (2015), 5
- Racimora, William, European Parliament, and Directorate-General for External Policies of the Union, *Salafist/Wahhabite Financial Support to Educational, Social and Religious Institutions: Study* (Luxembourg: EUR-OP, 2013) <<http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:BB3113945:EN>> [accessed 17 November 2021]
- Ramli, Affan, *Merajam Dalil Syariat*, Cet. 1 (Banda Aceh: Bandar Pub. ; Distributor, Diandra Primamitra Media, 2010)
- Sabil, Jabbar, 'Peran Ulama dalam Taqnin di Aceh', *Jurnal Transformasi Administrasi*, 02.01 (2012), 199–217
- Saby, Yusny, 'The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey', *Studia Islamika*, 8.1 (2001) <<https://doi.org/10.15408/sdi.v8i1.694>>
- Said, H. Mohammad, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: Harian WASPADA, 2007)
- Salim, Arskal, 'Dynamic Legal Pluralism in Indonesia: Contested Legal Orders in Contemporary Aceh', *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 42.61 (2010), 1–29 <<https://doi.org/10.1080/07329113.2010.10756640>>
- Salim, Arskal, and Azyumardi Azra, eds., *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, ISEAS Series on Islam Politics, Social Issues (Singapore, 2003)

- Salvatore, Armando, and Dale F. Eickelman, eds., *Public Islam and The Common Good*, Social, Economic, and Political Studies of the Middle East and Asia, v. 95 (Leiden ; Boston: Brill, 2004)
- Salvatore, Armando, and Mark LeVine, eds., *Religion, Social Practice, and Contested Hegemonies Reconstructing The Public Sphere in Muslim Majority Societies* (New York: Palgrave Macmillan, 2005)
- Sari, Cut Maya Aprita, 'Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh', *JURNAL REVIEW POLITIK*, 6.01 (2016), 68–89
- Satriya, Bambang, Andi Suwirta, and Ayi Budi Santosa, 'TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH DAN REVOLUSI DI ACEH (1945-1950)', *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 7.1 (2018) <<https://doi.org/10.17509/factum.v7i1.11925>>
- Shadiqin, Sehat Ihsan, 'Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?', *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25.1 (2010), 23–51
- , 'Otoritas Spiritual dan Perubahan Sosial: Jaringan dan Kontestasi Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Syaikh Muda Wali di Aceh' (unpublished Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017)
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Pemberontakan Kaum Republik: kasus Darul Islam Aceh*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990)
- Spencer, Martin E., 'Weber on Legitimate Norms and Authority', *The British Journal of Sociology*, 21.2 (1970), 123–34 <<https://doi.org/10.2307/588403>>
- Srimulyani, Eka, 'Teungku Inong Dayah: Female Religious Leaders in Contemporary Aceh', *Islam and the Limits of the State*,

2016, 141–65  
 <[https://doi.org/10.1163/9789004304864\\_007](https://doi.org/10.1163/9789004304864_007)>

Syaifullah, Syaifullah, ‘Pembaruan Pendidikan Islam Di Aceh: Studi Historis Tentang Jami’ah Almuslim 1929-2010’ (unpublished doctoral, Pascasarjana UIN-SU, 2012)  
 <<http://repository.uinsu.ac.id/320/>> [accessed 18 November 2020]

Syamsuddin, Nazaruddin, ‘Masyarakat Aceh dan Demokrasi’, in *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*, ed. by Muhammad Najib (Yogyakarta: LKPSM, 1996)

Taylor, Charles, ‘Modernity and the Rise of the Public Sphere’, *The Tanner Lectures on Human Values*, 14 (1992), 205–60

Thalal, Muhammad, and Muliadi Kurdi, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh* (Banda Aceh, Indonesia: Yayasan Aceh Mandiri, 2010)

Tim, *Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh*, II (Banda Aceh: Naskah Aceh & Dinas Syariat Islam, 2017)

Umar, Muhammad, *Darah Dan Jiwa Aceh: Mengungkap Falsafah Hidup Masyarakat Aceh*, Cet. 2 (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2008)

Usman, Nasir, Murniati Ar, and Marzuki Marzuki, ‘The Influence of Leadership in Improving Personnel Performance at Traditional Islamic Boarding School (Dayah)’, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4.2 (2016), 205–16  
 <<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v4i2.98>>

Veer, Paul Van, *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje* (Jakarta, Indonesia: PT. Grafiti Pers, 270AD)  
 <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1206857>> [accessed 15 March 2021]

- Wahib, Ahmad Bunyan, 'Being Pious Among Indonesian Salafists', *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55.1 (2017), 1–26 <<https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.1-26>>
- Wahid, Din, 'Challenging Religious Authority: The Emergence of Salafi Ustadz in Indonesia', *The Institute for the Study of Religion and Society (LSAS) and the Postgraduate Program (PPs), the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel Surabaya - Indonesia*, Volume 06, Number 02 (2012), 246–64 <<https://doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.2.245-264>>
- Warner, M., 'Publics and Counterpublics', *Public Culture*, 14.1 (2002), 49–90 <<https://doi.org/10.1215/08992363-14-1-49>>
- Weber, Max, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press, 1978)
- , 'The Three Types of Legitimate Rule', *Berkeley Publications in Society and Institutions.*, 4.1 (1958), 1–11
- Wiktorowicz, Quintan, 'Anatomy of the Salafi Movement', *Studies in Conflict & Terrorism*, 29.3 (2006), 207–39 <<https://doi.org/10.1080/10576100500497004>>
- Williams, Dana, 'Max Weber: Traditional, Legal-Rational, and Charismatic Authority', 12
- Wormser, Paul, 'The Religious Debates of Aceh in the Sixteenth and Seventeenth Century: An Invisible Cultural Dialogue?', *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 55.2/3 (2012), 369–82
- Yaakop, Mohd Rizal, and Asmady Idris, 'Wahabi Doctrine in Malaysia-Saudi Relations', *SSRN Electronic Journal*, 2010 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.1695742>>
- Yunus, Firdaus M, *Teungku Dayah: Syariat Islam dan Kontestasi Organisasi di Aceh*, ed. by Mukhlisuddin Ilyas, Disertasi (Banda Aceh, Indonesia: Bandar Publishing, 2020)

Zakaria, Rusydy, 'Overview of Indonesian Islamic Education: A Social, Historical and Political Perspective' (unpublished Thesis, The University of Waikato, 2007) <<https://researchcommons.waikato.ac.nz/handle/10289/2410>> [accessed 13 January 2020]

Zulkifli, Zulkifli, 'The Ulama in Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 37.1 (2013) <<https://doi.org/10.30821/miqot.v37i1.79>>

### **Dokumen**

Aceh, Gubernur, 'Peraturan Gubernur Aceh. No. 5. Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat' (Dinas Syariat Islam Prov. Aceh, 2018)

———, 'Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya' (Pemerintah Aceh)

———, 'Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian)' (Pemerintah Aceh)

———, 'Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)' (Pemerintah Aceh)

———, 'Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 -Tentang Peradilan Syariat Islam' (Pemerintah Aceh, 2002)

———, 'Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor: 04 Tahun 2011 Tetang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Waljamaah' (Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 2011)

Aceh, Plt. Gubernur, 'Surat Edaran No. 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari 'Itiqad Ahlunnah Waljama'ah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah' (Pemerintah Aceh, 2019)

- Adam Haris, 'Buku Putih Pembahasan Ilmiah Fatwa MPU Aceh No 9 Tahun 2014' (Kelompok Salafi, 2014)
- GAM;, Pemerintah RI;, 'Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement' (Pemerintah RI dan GAM, 2015), Helsinki
- Gubernur Aceh, 'Surat Edaran, No. Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Iktikat Ahlussunnah Waljamaah Mazhab Syafi'iyah' (Pemerintah Aceh, 2019)
- Indonesia, Presiden, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh' (Lembaga Negara Republik Indonesia, 1999)
- Maklumat Bersama, "Keputusan Konperensi Djabatn Agama Keresidenan Atjeh" Kutaradja, 20-24 Maret 1948' (Kantor Urusan Agama Kab. Atjeh Tengah-Takengon, 1948)

### **Website/ Internet**

- 'Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh', *Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh*  
<<http://disdikdayah.bandaacehkota.go.id/>> [accessed 5 March 2021]
- 'LDF Dukung Keputusan Plt Gubernur Aceh Larang Pengajian Selain I'Tiqad Ahlussunnah Waljama'ah', *Bangkit bersama rakyat*, 2019  
<<https://suaraindonesia-news.com/ldf-dukung-keputusan-plt-gubernur-aceh-larang-pengajian-selain-itiqad-ahlussunnah-waljamaah/>> [accessed 6 February 2020]
- 'MABAB Apresiasi Plt Gubernur Terkait Penertiban Pengajian Selain Ahlussunnah Wal Jamaah - Serambi Indonesia'  
<<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/28/mabab-apresiasi-plt-gubernur-terkait-penertiban-pengajian-selain-ahlussunnah-wal-jamaah>> [accessed 6 February 2020]

- ‘MPU ACEH | Ini Hasil Muzakarah Ulama Di MPU Aceh’, 2015  
 <<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2015/10/27/30/ini-hasil-muzakarah-ulama-di-mpu-aceh.html>>  
 [accessed 23 January 2019]
- ‘MPU Sosialisasikan Fatwa Nomor 9/2014 - Serambi Indonesia’, 2014  
 <<http://aceh.tribunnews.com/2014/08/22/mpu-sosialisasikan-fatwa-nomor-92014>> [accessed 23 January 2019]
- ‘Mualem Setujui 12 Tuntutan Aswaja - Serambi Indonesia’  
 <<https://aceh.tribunnews.com/2015/10/01/mualem-setujui-12-tuntutan-aswaja>> [accessed 14 October 2019]
- ‘Tentang Islamic Centre Bin Baz’, *Islamic Centre Bin Baz*  
 <<https://binbaz.or.id/tentang-islamic-centre-bin-baz/>>  
 [accessed 6 July 2021]
- ‘Terkait Peristiwa Di Lam Awee, Abdul Qadir Jailani: Saya Difitnah’  
 <<https://www.acehtrend.com/2016/04/01/terkait-peristiwa-di-lam-awee-abdul-qadir-jailani-saya-difitnah/>> [accessed 8 March 2021]
- ‘Website Resmi | Dinas Syariat Islam Aceh’  
 <<http://dsi.acehprov.go.id/>> [accessed 11 January 2021]
- aascenter, ‘Jumlah Masjid Terdaftar Di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2019’, *Open Data - Open Data Banda Aceh Datasource : Jumlah Masjid Terdaftar Di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh Tahun 2019*  
 <<https://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-mesjid-terdaftar-di-dinas-syariat-islam-kota-banda-aceh/resource/9c7c08ed-a614-4f29-865a-6d8d7f31a14f>>  
 [accessed 1 April 2021]
- aceh, ‘Apresiasi Surat Edaran Plt. Gubernur Aceh, PDA Minta Kajian Menyimpang Dihentikan | Rakyat Aceh’  
 <<https://harianrakyataceh.com/2019/12/26/apresiasi-surat-edaran-plt-gubernur-aceh-pda-minta-kajian-menyimpang-dihentikan/>> [accessed 6 February 2020]



Aceh, MPU, 'Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengalaman Dan Penyiaran Agama Islam Di Aceh' (Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 2014) <<https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/11/download-keputusan-mpu-aceh-tahu>>

Acehtrend, 'Tata Cara Ibadah Dan Pengajian Di Masjid Jabir Al-Ka'biy Meulaboh', *AceHTrend.Com*, 2019 <<https://www.acehtrend.com/2019/08/08/tata-cara-ibadah-dan-pengajian-di-masjid-jabir-al-kabiy-meulaboh/>> [accessed 21 August 2019]

AcehTrend.com, 'Emak-emak Rapatkan Barisan Di Masjid Oman, Tolak SK Wali Kota Tentang Pengurus BKM', 2020 <<https://www.acehtrend.com/2020/01/31/emak-emak-rapatkan-barisan-di-masjid-oman-tolak-sk-wali-kota-tentang-pengurus-bkm/>> [accessed 18 March 2021]

*Banda Aceh dalam Angka 'Banda Aceh Municipality in Figures 2019'* (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2019), II <<https://bandaacehkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/731a4401ebf3dcf4aa5c5414/kota-banda-aceh-dalam-angka-2019.html>> [accessed 11 March 2020]

Barometernews.id, 'Pemko Banda Aceh Ambil Alih Kepengurusan Masjid Oman, Pasca Pembubaran Pengajian Ustadz Farhan', 2020 <<https://barometernews.id/pemko-banda-aceh-ambil-alih-kepengurusan-masjid-oman-paska-pembubaran-pengajian-ustad-farhan/>> [accessed 28 January 2020]

BBCNews, 'Ustaz Firanda ditolak di Aceh karena "lebih cenderung ke Wahabi"', *BBC News Indonesia*, 14 June 2019, section Indonesia <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48617536>> [accessed 22 August 2019]

CNN, 'MUI Sesalkan Larangan Pengajian Selain Mazhab Syafi'i Di Aceh', 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230220615->

20-461169/mui-sesalkan-larangan-pengajian-selain-mazhab-syafii-di-aceh> [accessed 22 June 2021]

Cut, Fauzi, 'Terkait Peristiwa Di Lam Awee, Abdul Qadir Jailani: Saya Difitnah', *AceHTrend.Com*, 2016 <<https://www.acehtrend.com/2016/04/01/terkait-peristiwa-di-lam-awee-abdul-qadir-jailani-saya-difitnah/>> [accessed 24 January 2019]

DetikNews, 'Sekjen MUI Imbau Pemprov Aceh Cabut Larangan Pengajian Selain Mazhab Syafi'i', 2019 <<https://news.detik.com/berita/d-4840643/sekjen-mui-imbau-pemprov-aceh-cabut-larangan-pengajian-selain-mazhab-syafii>> [accessed 22 June 2021]

IPAC, Institute for Policy Analysis of Conflict, *The Anti-Salafi Campaign in Aceh* (Aceh: Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Oktober 2016), p. 27 <<http://www.understandingconflict.org/id/conflict/read/55/The-Anti-Salafi-Campaign-in-Aceh>> [accessed 31 January 2020]

Kumparan.com, 'Sekelompok Massa Hentikan Pengajian Ustaz Farhan di Masjid Oman, Aceh', *kumparan*, 2020 <<https://kumparan.com/acehkini/sekelompok-massa-hentikan-pengajian-ustaz-farhan-di-masjid-oman-aceh-1sj3jr2OdQG>> [accessed 15 June 2021]

Liputan6.com, 'Kaum Salafi Aceh Melawan Stigma Sesat', *liputan6.com*, 2019 <<https://www.liputan6.com/regional/read/3991213/kaum-salafi-aceh-melawan-stigma-sesat>> [accessed 8 March 2021]

Media Sunnah Aceh, *Sepenggal Kisah Awal Kehadiran Dakwah Sunnah Di Banda Aceh | Ustadz Harits Abu Naufal*, 2019 <<https://www.youtube.com/watch?v=RacZOjEIyio>> [accessed 29 May 2021]

- , *Membicarakan Konflik Wahabi Dan Aswaja*, 2020  
 <<https://www.youtube.com/watch?v=N7fttk9Fi4>>  
 [accessed 8 March 2021]
- MODUSACEH.CO, ‘Begini Cerita Jamaah Mushalla RSUDZA Banda Aceh - Rehat - MODUS ACEH - Bijak Tanpa Memihak’, *MODUSACEH.CO*, 2018  
 <<http://modusaceh.co/news/begini-cerita-jamaah-mushalla-rsudza-banda-aceh/index.html>> [accessed 22 August 2019]
- , ‘Ib-ibu Tak Terima Masjid Diambil Alih Pemerintah’, *MODUSACEH.CO* <<https://modusaceh.co/news/ib-ibu-tak-terima-masjid-diambil-alih-pemerintah/index.html>>  
 [accessed 18 March 2021]
- Muslim Clever, *Profil POSTIM (Pondok Study Islam Mahasiswa) Banda Aceh*  
 <<https://www.youtube.com/watch?v=iCIHeLlxFuA>>  
 [accessed 24 June 2021]
- POeSA Institute, *Diskusi Webinar: Konflik Aswaja Dan Wahabi Di Aceh*, 2020  
 <<https://www.youtube.com/watch?v=faH93RSw2qU>>  
 [accessed 19 June 2021]
- Rivan Noveriza, *Pembubaran Pengajian Ustadz Firanda Andirja di Masjid Al Fitrah Keutapang Banda Aceh*, 2019  
 <<https://www.youtube.com/watch?v=Jif-vIHmNA>>  
 [accessed 21 November 2021]
- sdik.an-nawawi.sch.id, ‘SDIK Imam An-Nawawi Aceh - Sekolah Dasar Islam Karakter Imam An-Nawawi Aceh’, *SDIK Imam An-Nawawi Aceh* <<https://sdik.an-nawawi.sch.id/>> [accessed 24 June 2021]
- Serambinews, ‘Ini Klarifikasi Salafi’, *Serambi Indonesia*, 2014  
 <<http://aceh.tribunnews.com/2014/08/22/ini-klarifikasi-salafi>> [accessed 23 January 2019]

Serambinews.com, 'MedS.TV, TV Dakwah Pertama Aceh yang Go Satelit', *Serambi Indonesia*  
 <<https://aceh.tribunnews.com/2021/04/28/medstv-tv-dakwah-pertama-aceh-yang-go-satelit>> [accessed 25 June 2021]

Tgk Samalanga, *BISA V : Bedah Buku Aswaja Dan Wahabi Di Aceh*, 2020  
 <<https://www.youtube.com/watch?v=70jucIPqVC0&t=5s>> [accessed 8 March 2021]

'Ini Dia "Umar Bin Khattab" Akhir Zaman', *Serambinews.Com*, 2015  
 <<http://aceh.tribunnews.com/2015/10/02/ini-dia-umar-bin-khattab-akhir-zaman.>>

'Kronologi Warga Aceh Tolak Ustaz Firanda | Tagar'  
 <<https://www.tagar.id/kronologi-warga-aceh-tolak-ustaz-firanda>> [accessed 8 March 2021]

'Sejarah Berdiri & Manhaj', *Wahdah Islamiyah*  
 <<https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>> [accessed 6 July 2021]

## **WAWANCARA**

Abdurrahman, Azhari Abu, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2021

Asyek, Edi, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2021

Dasilva, Rizky, Pembakaran Tapak Masjid Taqwa Muhammadiyah, 2017

Daud, Rusli, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020

Daud, Tarmizi, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020

- Husain, Mustafa, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Ifrizal, M, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Ihsan, M. Wahyu, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Manalu, Norma, Wawancara: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, 2020
- Naufal, Haris Abu, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Qardhawi, Yusuf, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Rafsanjani, Umar, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Selian, Hatta, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Tanjungan, Bulqaini, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Taran, Nauval Pally, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Ubit, Zainuddin, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020
- Yusuf, Yusbi, Wawancara: Kontestasi Otoritas Keagamaan antara Ulama Dayah Dayah dan Salafi-Wahabi di Kota Banda Aceh, 2020